

# **STRATEGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN SAMPANG**

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ULFIONA RIZKI ASHARI  
145030601111006**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MALANG  
2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Strategi Peningkatan Pembangunan Manusia di Kabupaten  
Sampang

Disusun oleh : Ulfiona Rizki Ashari

NIM : 145030601111006

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administasi Publik

Konsentrasi/Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, 28 Juni 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si  
NIP. 19710828 200604 1 001



**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 13 Juli 2018  
Pukul : 10.00 – 11.00 WIB  
Skripsi atas nama : Ulfiona Rizki Ashari  
Judul : Strategi Peningkatan Pembangunan Manusia di Kabupaten

Sampang

Dan dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Anggota

  
**Dr. Mohammad Nuh S.IP., M.Si**  
**NIP. 19710828 200604 1 001**

  
**Dr. Imam Hanafi M.Si., MS**  
**NIP.19691002 199802 1 001**

Anggota

  
**I Gede Eko Putra Sri Sentanu S.AP., M.AP., Ph.D**  
**NIP. 2011078312041000**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 29 Juni 2018

METERAI  
TEMPEL  
B0F18AFF124373184  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Ulfiona Rizki Ashari  
145030601111006

## CURRICULUM VITAE PENULIS

**A. Identitas Diri**

Nama : Ulfiona Rizki Ashari  
 Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 11 Januari 1996  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Status : Mahasiswa  
 Alamat di Malang : Perum. Bumi Palapa E-30, Kota Malang  
 Alamat Asal : Jl. Pudak RT/RW: 01/09 Desa Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo  
 Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya  
 Fakultas : Ilmu Administrasi  
 Jurusan/Minat : Administrasi Publik/ Perencanaan Pembangunan  
 NIM : 145030601111006  
 No.HP : 082334496114  
 Email : ulfionarizkiashari@yahoo.co.id

**B. Pendidikan Formal**

No	Pendidikan Formal	Tahun
1.	TK Al-Qoriyah Bakalan	2000 – 2002
2.	SDN 2 Polorejo	2002 – 2008
3.	SMPN 5 Ponorogo	2008 – 2011
4.	SMAN 1 Babadan	2011 – 2014
5.	Universitas Brawijaya Malang	2014 – 2018

**C. Pengalaman Berorganisasi**

No	Posisi	Organisasi	Tahun
1.	Staff Divisi Dana Usaha	Brawijaya Chess Club	2015
2.	Staff Bidang Eksternal	Research Study Club	2015
3.	Bendahara Umum 1	Brawijaya Chess Club	2016
4.	Ketua Bidang Internal	Research Study Club	2016
5.	Sekretaris Umum 1	Brawijaya Chess Club	2017
6.	Dewan Penasehat	Brawijaya Chess Club	2018

**D. Pengalaman Kepanitiaan**

No	Posisi	Kepanitiaan	Tahun
1.	Sekretaris Pelaksana	Musyawarah Besar Research Study Club	2015
2.	Koordinator Divisi Acara	Sambut Maba Research Study Club	2015

3.	Koordinator Divisi Kestari	TASMAFIA 2 BEM FIA-UB	2015
4.	Sekretaris Pelaksana 2	Turnamen Catur Raja Brawijaya III Brawijaya Chess Club	2015
5.	Steering Committee	Musyawarah Besar Research Study Club	2016
6.	Steering Committee	Sambut Maba Research Study Club	2016
7.	Steering Committee	Turnamen Catur Raja Brawijaya V Brawijaya Chess Club	2017

#### E. Prestasi

No	Prestasi	Penyelenggara	Tahun
1.	Juara 3 Penelitian Kualitatif	Research Study Club	2014
2.	Juara 2 Program Kreativitas Mahasiswa – Gagasan Tertulis	Fakultas Ilmu Administrasi	2015
3.	Lolos Pendanaan PKM-P Soshum “Merantau sebagai Budaya (Eksplorasi Sistem Sosial Masyarakat Pulau Bawean)”	Kemenristek Dikti	2016
4.	Lolos Pendanaan PKM-P Soshum “Optimalisasi Strategi Pemerintah Daerah Kota Batu Menuju Kota Layak Anak Melalui Perlindungan Hak-hak Anak”	Kemenristek Dikti	2016
5.	Jurnal Litbang Kebijakan “Merantau sebagai Budaya (Eksplorasi Sistem Sosial Masyarakat Pulau Bawean)”	Balitbang Jatim	2016
6.	Jurnal Litbang Kebijakan “Optimalisasi Strategi Pemerintah Daerah Kota Batu Menuju Kota Layak Anak Melalui Perlindungan Hak-hak Anak”	Balitbang Jatim	2016

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Penelitian ini untuk  
Orang tua tercinta (Ibu dan Ayah) Serta Keluarga Besar Bani Madirkam  
Yang Selalu Memanjatkan Doa Untuk Kesuksesan Penulis





## RINGKASAN

Ashari, Ulfiona Rizki. 2018. **Strategi Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang**. Ketua Dosen Pembimbing: Dr. Mohammad Nuh S.IP., M.Si. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

---

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten tertinggal 2015 – 2019 di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu 59,90 di tahun 2017. Status IPM Kabupaten Sampang tersebut jika disandingkan dengan standart yang ditetapkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) termasuk dalam tingkatan Menengah Bawah yaitu rentang nilai  $50 \leq \text{IPM} < 66$ . Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah yang tertinggi di Jawa Timur yaitu 23,56% dari total penduduk miskin di Jawa Timur. Sementara di bidang kesehatan, Kabupaten Sampang menempati posisi tertinggi dari angka kesakitan penduduk di Jawa Timur yaitu 25,46% di tahun 2014 dan 24,91% di tahun 2015. Berkaitan dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sampang melakukan beberapa upaya dalam mengentaskan ketertinggalan pembangunan manusia melalui beberapa program pembangunan yang secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala sehingga diperlukan analisis strategi pembangunan manusia di Kabupaten Sampang agar tepat sasaran. Adapun teori/konsep yang digunakan oleh penulis adalah konsep pembangunan, teori manajemen strategis, konsep pembangunan manusia (*human development concept*).

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang fenomena mengenai penyebab IPM di Kabupaten Sampang berada pada tingkatan menengah bawah dan strategi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang diangkat adalah penyebab IPM di Kabupaten Sampang berada pada tingkatan menengah bawah dan strategi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, daya beli). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Creswell serta analisis deskriptif SWOT.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat 3 aspek yang menyebabkan IPM di Kabupaten Sampang berada pada tingkatan menengah bawah aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan proses/tahapan manajemen strategi. Proses/tahapan manajemen strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang telah melalui ketiga proses manajemen strategi yaitu perumusan, penerapan, dan penilaian strategi. Hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan dalam penelitian ini didapatkan 11 strategi alternatif yang direkomendasikan untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam upayanya meningkatkan pembangunan manusia.

**Kata Kunci:** Pembangunan Manusia, Kabupaten Sampang, Strategi

## SUMMARY

Ashari, Ulfiona Rizki. 2018. **Strategy of Human Development Enhancement in Sampang Regency**. Supervisor: Dr. Mohammad Nuh S.IP., M.Si. Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya, Malang.

---

Sampang Regency is one of the disadvantaged districts of 2015 - 2019 in Indonesia set by President Jokowi with the value of Human Development Index (HDI) of 59.90 in 2017. The status of HDI in Sampang Regency compared to the standard set by the United Nations Development Program (UNDP) is clustered in the Lower Middle level of  $50 \leq \text{HDI} < 66$ . The number of poor people in Sampang Regency based on data from the Statistics Indonesia (*Badan Pusat Statistik*) is the highest in East Java which is 23.56% of the total poor population in East Java. While in the health sector, Sampang Regency occupies the highest position of the morbidity of the population in East Java that is 25.46% in 2014 and 24.91% in 2015. In connection with these conditions, the local government of Sampang Regency made several efforts in eradicating the lagging human development through several development programs that are technically implemented by the relevant Local Government' Agencies (*Organisasi Perangkat Daerah*). But in its implementation there are still encountered several obstacles that need analysis of human development strategy in Sampang Regency, so that it will achieve the right target. The theory/concept used by the author is the concept of development, the theory of strategic management, and human development concept.

This study aims to provide an overview of the phenomenon of the causes of the lower middle level of Human Development Index in Sampang Regency and the strategy of the Government of Sampang Regency in improving human development. The type of research used in this research is descriptive research with qualitative approach. The focus of the research is the causes of the lower middle level of Human Development Index in Sampang Regency and the strategy of the Government of Sampang Regency in improving human development (education, health, purchasing power). Data analysis techniques used in this study is data analysis by Creswell and SWOT descriptive analysis.

As for the result of this research is there are 3 aspects causing HDI in Sampang Regency at lower middle level in education, health, and economy. The strategy implemented by the Government of Sampang Regency in this study is viewed based on the process/stage of management strategy. In terms of process/stage management strategy of Sampang Regency, it has gone through three strategic management process that is formulation, implementation, and strategic assessment. The result of SWOT analysis that has been done in this research generated 11 recommended alternative strategies for the Government of Sampang Regency in its effort to increase human development.

**Keywords:** Human Development, Sampang Regency, Strategy



## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Strategi Peningkatan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang”** ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini merupakan tugas akhir kuliah yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Selama menyusun laporan penelitian ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun semua hambatan tersebut dapat teratasi berkat bimbingan dan dorongan semangat dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Mohammad Nuh S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Orang tua dan keluarga tercinta Ibuk Masrohah, Ayah Djoko Setyono, Bapak Imam Ashari, Budhe Hidayati, Budhe Khoiriyah, Pak Lik Fatchurrohman, Pak Puh Mansyur, mas mbak dan adik-adik sepupuku (Bani Madirkam) yang selalu memberikan kehangatan serta selalu memanjatkan doa untuk penulis serta Alm. Mbah Kakung Muhadjir, Almh. Mbah Putri Djemirah dan Alm. Pak Puh Sunardi. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa beruntungnya aku dikelilingi oleh orang-orang terkasih seperti kalian.
5. Keluarga Perencanaan Pembangunan 2014 yang selama 4 tahun ini kebersamaian, khususnya: MT.Haryono Squad (Vinda, Wildan, Erfan, Rizky Dayat); Magang JKT Squad (Deliana, Fariz, Natasha); Kesayanganku (Rica, Inayah, Ulfi, Sheila).

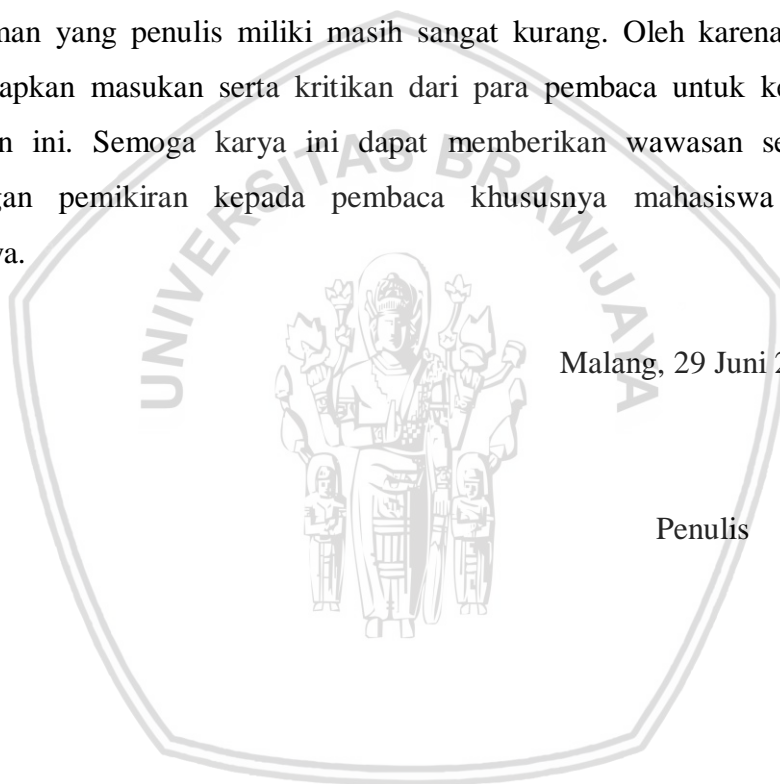
6. Keluarga *Research Study Club* khususnya: Pengurus RSC tahun 2015 dan 2016, Trio Kwek-Kwek (Mba Wulan Suci, Fitri, Kipti), Internalcuu (Evi, Obith, April, Bams, Anna), Sahabat PR (Tyo, Lisa, Ummu, Endah, Putri Fidya, Nadia, Anu, Djointa, Taufik), SistaKu (Rugayah, Zakiyah, Wulan, Diah), Pejuang Skripsi RSC (Azis, Taufan, Rijal, Irfan, Yordan) serta Kakak-kakakKu di RSC (Oppa Ihwanus, Mas Fahrur, Mba Khusnul, Mba Tina, Mas Dhyka, Om Burhan) yang selalu memberikan dorongan semangat untuk penulis.
7. Teman-teman *Brawijaya Chess Club* khususnya: Pengurus BCC tahun 2015, 2016 dan 2017; Para DP BCC 2018 (Rizky Akbar, Irwin, Yogi, Rizky Adhyaksa); Alhamdulillah Squad (Desy dan Nadya Devita); Teman sedari maba (Lucky, Roy, Nial, Cendy); Adik-adikku tersayang (Elga, Supri, Iftitah, Audie, Viola) yang selalu memberikan semangat untuk penulis.
8. LKP3 khususnya Bapak Dr. Siswidiyanto, MS selaku ketua Lab, Bapak Andy Kurniawan S.AP, M.AP selaku sekretaris lab, Bapak Andhyka Muttaqin S.AP, M.PA, serta teman-teman LKP3 (Mas Ardhi, Mas Reza, Mas Hamsa, Mas Said, Mas Yogi, Mas Rifqy, Mas Iman, Mas Hamim, Mas Ali, Mas Fathir, Mba Mega, Mba Tina, Mba Ria Esana, Idel, Farah, Faisal) yang selalu meluangkan waktunya untuk diskusi serta berbagi ilmu dan pengalaman untuk penulis.
9. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menjawab seluruh pertanyaan dan memberikan data untuk penulis: Bapak Bahrul Alim dan Bapak Reza Bayu dari Bappelitbangda Kabupaten Sampang; Bapak Moedjalli dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang; Ibu Madanise, Bapak Ludfi dan Bapak Choirul Anwar dari Diskumnaker Kabupaten Sampang; Ibu Lailatul Muadzomah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang; Bapak Arif Suroso dari BPS Kabupaten Sampang; serta Bapak Muhammad Irwan Ferdiawan dari Disperindagtam Kabupaten Sampang.
10. Dulur lanangku diperantauan (Bapak Wildan, Hanang, Arriza, Gusti, Godher) yang selalu memberikan tumpangan ketika pulang kampung.

11. Ciputat Squad (Kheti, Dianti, Novela, Mba Anaoby) keluarga baruku selama magang dan merantau di Jakarta.
12. Bolo Kurowo X4: Kak Fenti, Nadya Aoo, Erlinda, Henny, Yudi
13. Teman nge-kos sedari maba yang udah kaya saudara kandung: Mba Chintia
14. Partner AndalanQ: Rizky Akbar C.W

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Seperti keyakinan yang penulis yakini bahwa **“kesempurnaan hanya milik Allah SWT”** laporan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yang disebabkan oleh pengalaman yang penulis miliki masih sangat kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan serta kritikan dari para pembaca untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan wawasan serta menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya mahasiswa Universitas Brawijaya.

Malang, 29 Juni 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
SUMMARY .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Konsep Pembangunan .....	
1. Definisi Pembangunan .....	19
2. Paradigma Pembangunan .....	21
3. Perencanaan Pembangunan .....	25
4. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	27
C. Manajemen Strategis .....	
1. Pengertian dan Dimensi Manajemen Strategis .....	29
2. Analisis dan Pilihan Strategi .....	30
3. Model Manajemen Strategis .....	31
D. Konsep Pembangunan Manusia ( <i>Human Development Concept</i> ) .....	
1. Konsep Sustainable Development Goals .....	32
2. Indeks Pembangunan Manusia .....	34

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Fokus Penelitian .....	39
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	41

E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Instrumen Data .....	45
G. Analisis Data .....	47
H. Keabsahan Data .....	51

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Sampang .....	53
2. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang .....	59
3. Gambaran Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang .....	63
B. Penyajian Data	
1. Penyebab Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang Berada pada Tingkatan Menengah Bawah .....	65
2. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang .....	75
3. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	82
C. Analisis dan Interpretasi Data	
1. Penyebab Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang Berada pada Tingkatan Menengah Bawah .....	92
2. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang .....	97
3. Analisis SWOT .....	101

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108

DAFTAR PUSTAKA .....	xvii
LAMPIRAN .....	xxii

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 – 2016.....	3
Tabel 1.2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2016.....	4
Tabel 2.1	Hasil Penelusuran Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 2.2	Peta Konsep-konsep Pembangunan .....	20
Tabel 2.3	Perbandingan Antar Paradigma Pembangunan.....	23
Tabel 2.4	Perubahan Metodologi IPM.....	36
Tabel 4.1	Luas Wilayah (Ha) Menurut Kecamatan dan Kemiringan Tanah di Kabupaten Sampang .....	55
Tabel 4.2	Mutasi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang Tahun 2015.....	58
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2012 – 2015 .....	59
Tabel 4.4	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang Tahun 2016/2017 .....	60
Tabel 4.5	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Sampang Tahun 2016.....	61
Tabel 4.6	Jumlah Lembaga Usaha di Kabupaten Sampang Tahun 2013–2016.....	62
Tabel 4.7	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang Tahun 2012 – 2017 .....	63
Tabel 4.8	Strategi <i>Strength – Opportunities</i> (S-O) dalam Analisis SWOT .....	102
Tabel 4.9	Strategi <i>Strength – Threats</i> (S-T) dalam Analisis SWOT .....	103
Tabel 4.10	Strategi <i>Weakness – Opportunities</i> (W-O) dalam Analisis SWOT.....	104
Tabel 4.11	Strategi <i>Weakness – Threats</i> (W-T) dalam Analisis SWOT.....	105

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
	Gambar 2.1 Model Manajemen Strategis Komprehensif.....	31
	Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....	48





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sehubungan dengan dilimpahkannya beberapa wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara tidak langsung berdampak pada gencarnya pembangunan di daerah-daerah. Hal tersebut dilakukan juga demi untuk memenuhi salah satu dari kesembilan cita-cita pemerintah yaitu “Membangun dari Daerah-daerah Pinggiran”. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pembangunan daerah merupakan program turunan dari pembangunan nasional yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila indikator-indikator pembangunan berhasil meningkat atau setidaknya berada diposisi rata-rata. Ukuran keberhasilan pembangunan daerah tersebut secara kuantitatif dapat dilihat melalui kesejahteraan sosial masyarakat. Terdapat 4

indikator pengukur kesejahteraan sosial menurut Sjafrizal (2016:166-178) yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Gini Ratio, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran. Salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan informasi dari *United Nations Development Programme* (UNDP) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini sejalan dengan visi tujuan pembangunan berkelanjutan/ *sustainable development goals*, yaitu memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan manusia ([www.id.undp.org](http://www.id.undp.org)). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa IPM sangat relevan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah di Indonesia yang dilihat mulai dari manusianya sendiri. Melihat kesimpulan tersebut, dapat diartikan bahwa pembangunan daerah sangat erat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dikatakan sejahtera ketika pembangunan suatu daerah/ wilayah cenderung membaik, baik secara fisik maupun non fisik.

Secara definisi IPM merupakan sebuah indikator dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengukur bagaimana penduduk suatu negara dapat mengakses hasil pembangunan ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standart hidup layak. Komponen pengukuran IPM terbagi menjadi 2 yaitu metode lama (antara tahun 1990 – 2009) dan metode baru (antara tahun 2010 – saat ini). Pada metode lama, komponen pembentuk IPM secara rinci diperoleh dari data Angka Harapan Hidup (AHH),

Angka Melek Huruf, kombinasi Angka Partisipasi Kasar dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, serta metode hitungnya menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru komponen pembentuk IPM secara rinci diperoleh dari data Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah, dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, serta metode hitungnya menggunakan rata-rata geometrik.

Pulau Jawa dan sekitarnya (termasuk di dalamnya Kepulauan Seribu dan Pulau Madura) merupakan salah satu pulau di Indonesia yang paling pesat pembangunannya jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pusat pemerintahan dan perekonomian Negara Indonesia berada di Pulau Jawa sehingga memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang gencar baik secara fisik maupun manusianya. Disisi lain, nilai IPM di Pulau Jawa secara rata-rata termasuk tinggi (diatas IPM Indonesia) dibandingkan pulau lainnya. Berikut adalah daftar IPM provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa:

**Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi**

**Tahun 2011 – 2017**

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	76,98	77,53	78,08	78,39	78,99	79,60	80,06
Jawa Barat	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50	70,05	70,69
Jawa Tengah	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52
DI Yogyakarta	75,93	76,15	76,44	76,81	77,59	78,38	78,89
Jawa Timur	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27
Banten	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42
Indonesia	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data dari BPS diatas, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang dengan pembangunan daerah yang produktif ternyata justru menjadi provinsi dengan IPM terendah pada tahun 2017 diantara provinsi lain di Pulau Jawa. Pembangunan daerah di Jawa Timur dikatakan produktif karena Jawa Timur termasuk ke dalam salah satu provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan IPM paling pesat pada tahun 2011 – 2017 ([www.data.go.id](http://www.data.go.id)). Meskipun IPM Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2017 namun IPM Provinsi Jawa Timur masih berada dibawah rata-rata IPM Indonesia yaitu 70,27 dengan IPM rata-rata Indonesia yaitu 70,81. Nilai IPM di Jawa Timur tersebut didapat dari akumulasi nilai IPM kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Berikut adalah daftar nilai IPM di Jawa Timur apabila dijabarkan berdasarkan kabupaten/kota:

**Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2011 - 2017**

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Pacitan	62,03	62,94	63,38	63,81	64,92	65,74	66,51
Kabupaten Ponorogo	65,28	66,16	67,03	67,40	68,16	68,93	69,26
Kabupaten Trenggalek	64,27	65,01	65,76	66,16	67,25	67,78	68,10
Kabupaten Tulungagung	67,76	68,29	69,30	69,49	70,07	70,82	71,24
Kabupaten Blitar	65,47	66,17	68,01	66,88	68,13	68,88	69,33
Kabupaten Kediri	66,84	67,29	68,01	68,44	68,91	69,87	70,47
Kabupaten Malang	63,97	64,71	65,20	65,59	66,63	67,51	68,47
Kabupaten Lumajang	60,72	61,31	61,87	62,33	63,02	63,74	64,23
Kabupaten Jember	60,72	61,31	61,87	62,64	63,04	64,01	64,96
Kabupaten Banyuwangi	65,48	66,12	66,74	67,31	68,08	69	69,64
Kabupaten Bondowoso	60,46	62,24	63,31	63,43	63,95	64,52	64,75
Kabupaten Situbondo	60,82	62,23	63,43	63,91	64,53	65,08	65,68
Kabupaten Probolinggo	60,30	61,33	62,61	63,04	63,83	60,12	64,28
Kabupaten Pasuruan	61,43	62,31	63,74	64,35	65,04	65,71	66,69
Kabupaten Sidoarjo	74,48	75,14	76,39	76,78	77,43	78,17	78,70

Kabupaten Mojokerto	68,71	69,17	69,84	70,22	70,85	71,38	72,36
Kabupaten Jombang	66,84	67,82	68,63	69,07	69,59	70,03	70,88
Kabupaten Nganjuk	66,58	68,07	68,98	69,59	69,90	70,50	70,69
Kabupaten Madiun	65,98	67,32	68,07	68,60	69,39	69,67	70,27
Kabupaten Magetan	68,52	69,56	69,86	70,29	71,39	71,94	72,60
Kabupaten Ngawi	65,84	66,72	67,25	67,78	68,32	68,96	69,27
Kabupaten Bojonegoro	63,22	64,20	64,85	65,27	66,17	66,73	67,28
Kabupaten Tuban	62,47	63,36	64,14	64,58	65,52	66,19	66,77
Kabupaten Lamongan	66,21	67,51	68,90	69,42	69,84	70,34	71,11
Kabupaten Gresik	71,11	72,12	72,47	72,84	73,57	74,46	74,84
Kabupaten Bangkalan	58,63	59,65	60,19	60,71	61,49	62,06	62,30
Kabupaten Sampang	55,17	55,78	56,45	56,98	58,18	59,09	59,90
Kabupaten Pamekasan	60,42	61,21	62,27	62,66	63,10	63,98	64,93
Kabupaten Sumenep	58,70	60,08	60,84	61,43	62,38	63,42	64,28
Kota Kediri	72,93	73,53	74,53	74,62	75,67	76,33	77,13
Kota Blitar	73,08	73,53	74,53	75,26	76	76,71	77,10
Kota Malang	77,36	78,04	78,44	78,96	80,05	80,46	80,65
Kota Probolinggo	68,14	68,93	70,05	70,49	71,01	71,50	72,09
Kota Pasuruan	70,41	72,01	72,89	73,23	73,78	74,11	74,39
Kota Mojokerto	73,47	74,20	74,91	75,04	75,54	76,38	76,77
Kota Madiun	76,48	77,21	78,41	78,81	79,48	80,01	80,13
Kota Surabaya	77,62	78,05	78,51	78,87	79,47	80,38	81,07
Kota Batu	69,76	70,62	71,55	71,89	72,62	73,57	74,26

Sumber: [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id)

Menurut data BPS diatas, Kabupaten Sampang adalah kabupaten/kota dengan IPM terendah di Jawa Timur yaitu 59,90 pada tahun 2017. Secara general nilai IPM di Kabupaten Sampang meningkat akan tetapi hal tersebut tidak membuat nilai IPM di Kabupaten Sampang lebih baik dari kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Artinya peningkatan nilai IPM di Kabupaten Sampang cenderung stagnan atau tidak mengalami peningkatan yang berarti. Terlebih jika disandingkan dengan tingkatan status IPM menurut UNDP, nilai IPM Kabupaten berada pada tingkatan Menengah Bawah yaitu di rentang nilai  $50 \leq \text{IPM} < 66$ .

Berdasarkan data tabel diatas, pada dasarnya terdapat 9 kabupaten di Jawa Timur yang memiliki nilai IPM dengan kategori Menengah Bawah. Kesembilan kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Dari kesembilan kabupaten tersebut, Kabupaten Sampang adalah kabupaten yang memiliki nilai IPM terendah bila dibandingkan dengan 8 kabupaten lainnya dengan nilai IPM dibawah 60,00.

Beberapa hal yang menyebabkan nilai IPM di Kabupaten Sampang rendah adalah dikarenakan nilai komponen pembentuk IPM di Kabupaten Sampang juga rendah. Sebagai contohnya adalah, menurut data dari BPS Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sampang dari tahun 2012 – 2017 yang masih berada dibawah AHH Jawa Timur, yaitu pada rentang angka 67,43 – 67,67 sementara AHH Jawa Timur pada rentang angka 70,14 – 70,80. Selain itu, nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sampang tahun 2012 – 2017 berada di angka 3,27 – 4,12 angka tersebut berada jauh dibawah nilai RLS Jawa Timur yang berada di angka 6,85 – 7,34. Kondisi tersebut juga diperparah dengan angka pengeluaran per kapita per tahun Kabupaten Sampang tahun 2012 – 2017 yang berada di angka 7.692 – 8.352 dan masih berada dibawah angka pengeluaran per kapita per tahun Jawa Timur yang berada di angka 9.797 – 10.973. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang menurut data BPS adalah yang tertinggi di Jawa Timur yang mencapai 22.513.000 penduduk miskin atau sebesar 23,56% dari total



penduduk miskin di Jawa Timur. Di bidang kesehatan, Kabupaten Sampang menempati posisi tertinggi dari angka kesakitan penduduk di Jawa Timur yaitu 25,46% di tahun 2014 dan 24,91% di tahun 2015.

Melihat kondisi masyarakat Kabupaten Sampang yang ditinjau dari angka kemiskinan dan kesehatan yang masih rendah maka diperlukan peran dari pemerintah untuk membangun wilayah ini. Pembangunan yang dimaksud disini adalah dari segi sumber daya manusianya. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang ekonom asal India, Amartya Sen sebagaimana dikutip oleh Pineda (2012:2) yang menyatakan bahwa pembangunan manusia berkaitan dengan dasar pengembangan gagasan untuk memajukan kekayaan kehidupan manusia, daripada kekayaan ekonomi dimana manusia hidup. Oleh sebab itu pembangunan manusia di Kabupaten Sampang ini harus segera dilakukan yaitu dimulai dengan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan angka harapan lama sekolah serta meningkatkan kualitas kesehatan. Terlebih dikarenakan Kabupaten Sampang secara letak geografis termasuk berada di daerah pinggiran Jawa Timur dan termasuk kedalam salah satu kabupaten tertinggal 2015-2019 di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih.

Pemerintah daerah Kabupaten Sampang sebenarnya sudah mengusahakan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui visi misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sampang tahun 2013 – 2018. Ada dua misi pemerintah daerah Kabupaten Sampang yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan



masyarakat yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut. Bunyi dari misi tersebut adalah “meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan dasar kepada masyarakat” yang pengukurannya dilihat melalui 2 indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan. Bunyi misi yang selanjutnya adalah “meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal” yang pengukurannya dilihat melalui 6 indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB (ADHK), PDRB (ADHB), pendapatan per kapita, laju inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya misi-misi tersebut dirumuskan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan dan turun dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan.

Stephani K. Marrus dalam Umar (2001:31) berpendapat bahwa strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Berbicara mengenai strategi, ada 2 jenis strategi dalam pembangunan yaitu strategi yang sudah pernah diterapkan oleh pemerintah dan strategi yang baru akan diterapkan oleh pemerintah. Strategi yang sudah pernah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu dengan meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap semua jenjang pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Melihat capaian kinerja

pemerintah daerah Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2015 secara general berada pada nilai “baik” membuat strategi yang sudah ada tersebut layak untuk dikaji dan diterapkan kembali agar lebih maksimal hasilnya.

Strategi yang coba diterapkan pemerintah Kabupaten Sampang dalam upayanya meningkatkan pembangunan manusia sebagai langkah mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah tentu menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Peningkatan pembangunan manusia yang dimaksudkan disini bukan hanya dari sisi kenaikan nilai trend IPM saja tetapi lebih kepada upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan ketertinggalan nilai IPM di Kabupaten Sampang jika dibandingkan kota/kabupaten lain di Pulau Jawa dan sekitarnya. Terutama terkait pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi dasar pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam merumuskan strategi tersebut yang kemudian diimplementasikan serta apa saja yang menjadi evaluasi sehingga isu pembangunan manusia di Kabupaten Sampang ini masih belum terentaskan. Terlebih dikarenakan Kabupaten Sampang termasuk ke dalam daftar daerah pinggiran Jawa Timur. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul penelitian **“Strategi Peningkatan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang berada pada tingkatan Menengah Bawah?
2. Bagaimana strategi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penyebab Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang berada pada tingkatan Menengah Bawah.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia.

### D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini dari segi teoritis adalah sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan kajian skripsi yang kemudian nantinya dihubungkan pada keadaan di lapangan.

2. Kontribusi Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini dari segi praktis adalah sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Sampang terkait strategi peningkatan pembangunan manusia dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memperjelas isi dari masing-masing bab yang ada pada skripsi. Adapun susunan bab dari penulisan skripsi dan sistematika pembahasan skripsi adalah sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi data-data pendukung seperti, penelitian-penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Konsep Pembangunan (termasuk didalamnya Definisi Pembangunan, Paradigma Pembangunan, Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah); Manajemen Strategis (termasuk di dalamnya Definisi dan Dimensi Manajemen Strategis, Perencanaan Strategis).

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data dan keabsahan data.

### BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan terkait gambaran umum dan kondisi yang ada di Kabupaten Sampang, penyajian data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab IPM di Kabupaten Sampang dalam kondisi menengah-bawah dan strategi peningkatan IPM, serta analisis data terkait kedua fokus tersebut dan tabel perumusan strategi.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian penulis. Kesimpulan dan saran yang disajikan dapat berupa rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sampang terkait dengan peningkatan IPM yang ada di daerahnya.

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan pembangunan manusia, terdapat beberapa kajian yang mendukung penelitian ini. Berikut penulis sajikan beberapa kajian tersebut dalam tabel:

Tabel 2.1 Hasil Penelusuran Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Michael, Bryane (2015) <i>“What Does Brunei Teach Us About Using Human Development Index Rankings as a Policy Tool”</i>	Sektor Pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia, Perencanaan Strategis Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, dan Kebijakan Fiskal	Sebagai negara yang berada pada peringkat menengah atas, PDB per kapita Brunei Darussalam berada pada peringkat 10. Namun ketika pendapatan dari sektor minyak bumi dihapus, Brunei justru menempati peringkat 38. Hal tersebut mencerminkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Brunei menduduki posisi 30 an. Dalam kajian penelitian ini penulis membahas mengenai upaya pemerintah Brunei dalam menempatkan IPM nya agar pantas di posisi 10 besar. Analisis yang dilakukan oleh pemerintah Brunei terkait tingkat pertumbuhan yang diperlukan untuk mencapai IPM yang layak. Beberapa tingkat pertumbuhan tersebut yakni: pertumbuhan optimal dalam nilai tambah sektor konstruksi (tingkat pertumbuhan yang akan memaksimalkan nilai pertumbuhan PDB); perubahan yang diperlukan dalam pertumbuhan sektor ekonomi agar mencapai tingkat pertumbuhan utama; kemungkinan perubahan nilai tambah sektor; upaya Departemen Keuangan Brunei dalam menghitung pertumbuhan optimal dalam output sektor untuk mencapai tingkat pertumbuhan output yang optimal; dan terakhir terkait upaya para pembuat kebijakan



			dalam membandingkan tingkat pertumbuhan yang optimal dengan tingkat pertumbuhan yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan utama yang diperlukan dalam memaksimalkan IPM negara.
2	Engineer, Merwan. et al (2008) <i>“The Human Development Index as a Criterion for Optimal Planning”</i>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM merupakan perhitungan statistik yang banyak dikutip untuk digunakan sebagai ukuran kesejahteraan diberbagai negara. Untuk memaksimalkan IPM sebagai kriteria untuk rencana yang optimal maka hal tersebut akan mendorong para perencana untuk menekankan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan melalui penurunan biaya konsumsi. Idealnya komponen pendapatan pada IPM secara efektif dapat menggandakan jumlah pendidikan dan pencapaian kesehatan. Namun dalam penelitian ini, komponen pendapatan belum mampu memainkan perannya untuk mengamankan sumber daya untuk standar hidup yang layak. Sehingga muncul pemikiran untuk mengeluarkan komponen pendapatan tersebut dari IPM untuk rencana yang lebih optimal dibandingkan dengan IPM yang saat ini. Meski begitu, pendekatan tersebut masih terdapat kekurangan, sehingga peneliti mempertimbangkan menambahkan komponen pendapatan bersih (diluar pendidikan dan kesehatan) sebagai indikator standar kehidupan yang layak. Hasilnya indeks modifikasi tersebut menghasilkan perubahan peringkat yang jauh lebih besar.
3	Fort, Alfredo L. et al (2017) <i>“The Human Resource for Health Effort Index: A tool to Assess and Inform Strategic Health Workforce Investments”</i>	Penguatan sistem kesehatan, Tenaga kerja kesehatan, Sumber daya manusia untuk kesehatan, Indeks	Bidang sumber daya manusia untuk kesehatan ( <i>Human Resource for Health</i> ) telah tertinggal dalam mengembangkan metode untuk mengukur status dan kejuannya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang menderita krisis tenaga kerja. Ukuran kepadatan dan distribusi pekerja kesehatan profesional adalah murni numerik, tidak dapat diandalkan, dan tidak mewakili spektrum penuh layanan kesehatan pekerja. Untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai karakteristik multi-dimensi sumber daya manusia untuk kesehatan, pada tahun 2013-



			2014 proyek Kapasitas Plus global yang didanai USAID dan dipimpin oleh Intra Health Internasional mengembangkan dan menguji 79 item upaya Indeks HRH yang dimodelkan setelah banyak digunakan Indeks Upaya Keluarga Berencana.
4	Hatefi, S.M (2018) “ <i>Strategic Planning of Urban Transportation System Based on Sustainable Development Dimensions Using an Integrated SWOT and Fuzzy COPRAS Approach</i> ”	Perencanaan Strategis, Analisis SWOT, Metode COPRAS Fuzzy, Sistem Transportasi	Mempertimbangkan pentingnya transportasi berkelanjutan, analisis SWOT dan metode COPRAS Fuzzy ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi yang tepat untuk peningkatan status sistem transportasi di Kota Shahrekord. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem transportasi di Shahrekord ditempatkan dalam posisi konservatif. Strategi konservatif tersebut kemudia diusulkan untuk meningkatkan status sistem transportasi melalui integrasi dari kelemahan dan peluang. Kriteria untuk pengembangan transportasi yang berkelanjutan digunakan untuk mengevaluasi strategi yang diusulkan. Sebanyak tiga kriteria ekonomi, lingkungan, dan sosial serta sembilan sub-kriteria dipilih untuk evaluasi strtegi yang diusulkan. Akhirnya, metode COPRAS Fuzzy digunakan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan strategi yang diusulkan berdasarkan kriteria pembangunan berkelanjutan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi yang diusulkan “daya tarik investor swasta untuk mengatur jembatan pejalan kaki dilengkapi dengan eskalator dan konsesi penggunaannya untuk pembetulan iklan lingkungan” dan “penggalangan dana untuk membuat taman di kota” masing-masing ditempatkan di peringkat pertama dan kedua.
5	Noto, G (2018) “ <i>Local Strategic Planning and Stakeholder Analysis: Suggesting a Dynamic Performance Management Approach</i> ”	Perencanaan Strategis, Pendektana Manajemen Kinerja Dinamis	Jurnal ini berfokus pada kontribusi yang diberikan oleh analisis pemangku kepentingan untuk perencanaan strategis lokal. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menangani masalah yang muncul dari ketidaksesuaian antara teori (ekspektasi) dengan praktik (realita), menghubungkan kegiatan para pemangku kepentingan dengan kinerja daerah setempat. Mulai dari analisis studi yang relevan pada manajemen kinerja di sektor publik,

			<p>perencanaan strategis, dan teori pemangku kepentingan, pekerjaan ini menyarankan adopsi manajemen kinerja dinamis sebagai pendekatan instrumental untuk memandu analisis pemangku kepentingan dalam proses perencanaan strategis lokal. Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan literatur yang luas dan didasarkan pada pembingkai kembali kasus nyata dari pengalaman perencanaan strategis Kota Italia.</p>
6	<p>Kayuni, H.M (2017)  <i>“Strategic Planning in the Malawi Public Sector: Potential Tool for Progress or Regression?”</i></p>	<p><i>New Public Management, Manajemen Strategis, Reformasi sektor publik, Perencanaan Strategis</i></p>	<p>Munculnya stigma dalam masyarakat yang berkembang di Malawi bahwa perencanaan strategis mampu memastikan bahwa pelaksanaan organisasi sektor publik (seperti halnya sektor swasta) yang mampu memberikan layanan yang lebih baik dengan biaya lebih murah. Hal ini membuat Malawi pada awal tahun 2000an memulai perjalanan yang serius menuju proses perencanaan strategis sebagai bagian dari pembaharuannya. Untuk memastikan potensi berubahnya layanan publik di Malawi, jurnal ini memfokuskan pada analisis kritis proses perencanaan strategis di sektor publik Malawi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses perencanaan strategis bersifat “transisional dan cair” sehingga tidak memiliki pengaruh secara efektif untuk meningkatkan reformasi di sektor ini. Temuan lainnya yaitu kurangnya kepemimpinan efektif telah banyak berkontribusi pada status quo.</p>
7	<p>Hoglund, L. et al (2018)  <i>“Strategic Management in the Public Sector: How Tools Enable and Constrain Strategy Making”</i></p>	<p><i>Manajemen Strategis, New Public Management (SPM),</i></p>	<p>Manajemen strategis telah menjadi suatu hal yang menonjol dalam agenda beberapa organisasi publik karena adanya reformasi <i>New Public Management (NPM)</i>. Terdapat beberapa penelitian yang menyelidiki tentang upaya organisasi publik dalam menerapkan manajemen strategis serta alat apa yang digunakannya. Dalam penelitian ini menyajikan studi kasus kualitatif tentang bagaimana manajemen strategis ini telah diterapkan di <i>Swedish Transport Administration (STA)</i> yaitu sebuah lembaga pemerintah pusat yang ada di Swedia, serta alat apa yang digunakan dalam menyusun strategi. Berdasarkan analisis proses mikro terkait</p>

			<p>penyusunan strategi di STA, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah organisasi publik perlu menyadari setidaknya 3 ketegangan khusus yang dapat mengaktifkan atau membatasi pembuatan strategi. Ketegangan yang dimaksud tersebut adalah: jangka pendek vs jangka panjang; sebagian vs keseluruhan; reaktif vs proaktif</p>
8	<p>Johnsen, A (2016)  <i>"Strategic Planning and Management in Local Government in Norway: Status After Three Decades"</i></p>	<p>Perencanaan Strategis, Pemerintah Daerah</p>	<p>Perencanaan dan manajemen strategis diperkenalkan di sektor publik lebih dari 3 dekade lalu dan telah menjadi komponen inti dalam banyak reformasi <i>New Public Management</i>. Meskipun strategi telah diadopsi secara luas di sektor publik, basis pengetahuan mengenai praktik-praktiknya dan dampaknya masih langka, terutama di luar negara-negara Anglo-Amerika. Jurnal ini mereplikasi survei di Amerika dan Inggris dengan menganalisis adopsi dan dampak perencanaan strategis dan manajemen di kota Norwegia. Hasilnya menunjukkan bahwa, pada tahun 2012 mayoritas kotamadya Norwegia menggunakan perencanaan dan manajemen strategis, dan bahwa responden memandang dampaknya secara keseluruhan secara positif. Kota-kota yang telah memilih posisi strategis prospektor dan memiliki sumber daya keuangan dari hasil operasi bersih yang positif, margin mengadopsi perencanaan strategis dan manajemen lebih dari kota-kota lain. Kota-kota dengan tingkat manajemen strategis yang tinggi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang tinggi memiliki dampak perencanaan strategis yang lebih baik daripada kota-kota lain.</p>
9	<p>Favoreu, C et al (2016)  <i>"Strategic Management in the Public Sector: a Rational, Political or Collaborative Approach?"</i></p>	<p>Manajemen Kolaboratif, Manajemen Strategis</p>	<p>Meskipun bereksperimen dalam organisasi publik selama lebih dari 30 tahun, perencanaan strategis dan manajemen masih meningkatkan sejumlah pertanyaan dan keraguan mengenai kemampuan mereka untuk meningkatkan kinerja publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat proses perumusan strategi di sektor publik dan jenis pendekatan strategis yang paling sesuai dengan karakteristik sektor ini. Ini ditetapkan untuk terlebih dahulu menyusun grid analisis teoritis, berdasarkan pada 3 pendekatan utama untuk strategi di</p>

			<p>sektor publik. Hal ini diikuti oleh studi kasus eksplorasi yang mengungkap proses strategis kompleks yang menggabungkan dan bergantian logika rasional, kolaboratif dan pengambilan keputusan politik, dan pengembangan terencana dan tambahan. Poin untuk praktisi: penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk menggabungkan berbagai logika dan pendekatan dalam pengendalian strategis organisasi publik: logika rasional, logika politik, dan logika kolaboratif. Ini menggarisbawahi, khususnya, pentingnya bagi manajer publik untuk membangun ketrampilan dalam pengembangan dan manajemen jaringan antar-organisasi dan hubungan interpersonal. Kemampuan untuk menciptakan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk memobilisasi dan menyalurkan kecerdasan kolektif menuju definisi dan implementasi proyek dan kebijakan publik merupakan komponen kunci dari manajemen strategis organisasi publik.</p>
10	<p>Rahayu, S et al (2016) <i>“Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure to Human Development Index (HDI) in Papua, Indonesia”</i></p>	<p>Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Pemerintah Daerah</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan peningkatan dalam keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah, dengan desentralisasi pemerintah daerah dapat mengatur dan membiayai daerah dengan pendapatan pemerintah daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang dihabiskan tercermin dalam belanja modal yang ditujukan untuk meningkatkan IPM. Tetapi fakta bahwa peningkatan pendapatan daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tercermindalam belanja modal belum mampu meningkatkan IPM mengikuti peningkatan ketimpangan IPM di Papua, Indonesia yang berada pada posisi terendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pemerintah daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus melalui belanja modal ke IPM. Dengan menggunakan regresi berganda terhadap penduduk kabupaten/kota Provinsi Papua secara bersamaan diperoleh hasil pendapatan pemerintah daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus melalui belanja modal</p>

			yang berpengaruh signifikan dan hanya sebagian dana alokasi umum dan khusus yang tidak mempengaruhi IPM. Pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan pemerataan pembangunan untuk memungkinkan peningkatan IPM di wilayah atau negara.
--	--	--	---

Sumber: Olahan Penulis, 2018

Berdasarkan beberapa kajian penelitian terdahulu diatas, letak perbedaan penelitian yang diambil oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada fokus penelitian yang diambil oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus pada:

1. Faktor-faktor penyebab nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang berada di posisi Menengah Bawah
2. Strategi pemerintah daerah Kabupaten sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Sampang

## **B. Konsep Pembangunan**

### **1. Definisi Pembangunan**

Sebelum membahas lebih lanjut terkait konsep pembangunan penulis terlebih dahulu akan memaparkan terkait definisi-definisi konsep pembangunan berdasarkan pendapat para ahli. Suryono (2010:53) mendefinisikan konsep pembangunan yang dikaji melalui 2 aspek penting yakni secara etimologik dan secara ensiklopedik. Secara lebih rinci penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

- a) Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalam pem- dan akhiran -an guna menunjukkan perihai



pembangunan. Kata bangun setidaknya-tidaknya mengandung 4 arti: (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi), (2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek bentuk).

- b) Secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogkan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*construction*).

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami definisi-definisi diatas, pemaparan konsep pembangunan menurut Suryono kemudian diperinci kedalam peta konsepsi pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Peta Konsep-konsep Pembangunan**

Konsep	Pendekatan	Orientasi
Pertumbuhan ( <i>Growth</i> )	Ekonomi	Negara-negara Dunia (umum)
Rekonstruksi ( <i>Reconstruction/Recovery</i> )	Pemulihan Ekonomi	Eropa (negara yang terlibat PD II)
Modernisasi ( <i>Modernization</i> )	Iptek	Negara Dunia Ketiga
Westernisasi ( <i>Westernization</i> )	Kebudayaan dan Iptek	Negara Dunia Ketiga (Sebelah Timur)
Perubahan Sosial ( <i>Social Change</i> )	Sosial	Negara Dunia Ketiga
Pembebasan ( <i>Liberation</i> )	Ekonomi – Politik	Amerika Latin
Pembaharuan ( <i>Innovation</i> )	Iptek, kemudian Sosial – Politik	Negara Dunia Ketiga
Pembangunan Bangsa ( <i>Nation Building</i> )	Politik	Negara Baru Merdeka
Pembangunan Nasional ( <i>National Development</i> )	Politik	Negara Baru Merdeka
Pengembangan	Politik	Indonesia
Pembinaan	Politik	Indonesia
Pembangunan	Campuran (Eklektik)	Negara Dunia Ketiga



Sumber: Suryono, 2011:53-54

Berdasarkan tabel peta konsep-konsep pembangunan menurut Suryono diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Indonesia mengarah pada konsep pengembangan dan pembinaan.

Sementara Harjanto (2011:1) mendefinisikan teori pembangunan sebagai teori yang berhubungan dengan masalah-masalah pembangunan, yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang terjadi disuatu masyarakat atau suatu daerah atau suatu negara guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Jika dilihat dari definisi tersebut hal yang perlu digaris bawahi dalam pembangunan adalah terkait meningkatkan kesejahteraan manusia. Peningkatan kesejahteraan manusia inilah yang menjadi tujuan akhir dari sebuah pembangunan.

## 2. Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United National Development Programme* (UNDP) dan telah menjadi komitmen global sebagai kerangka pembangunan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri perkembangan pembangunan tidak bisa terlepas dari adanya perkembangan paradigma pembangunan manusia. Suryono (2010:114) mengartikan paradigma sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, metodologi tertentu, model tertentu, dan solusi tertentu.

Bagi negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) kualitas sumber daya manusia merupakan permasalahan mendasar yang menjadi

dalang dari munculnya permasalahan lain. Kualitas sumber daya manusia yang buruk akan menyebabkan tidak meratanya pendapatan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Sementara kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan yang sebaliknya. Pentingnya kualitas manusia dalam masyarakat ini sejalan dengan pendapat Kartasmita (1996) yang dikutip oleh Suryono (2010:6) karena sumber daya alam sudah menjadi lebih kecil peranannya sebagai faktor keunggulan untuk persaingan.

Adanya ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara maju dan adanya kecenderungan negara-negara berkembang untuk meniru negara-negara maju, seringkali dicapai dengan mengadaptasi berbagai paradigma pembangunan yang dirasa baik dan cocok untuk negaranya. Tjokrowinoto (1996) dalam Suryono (2010:16) menjelaskan bahwa akan timbul pergeseran-pergeseran paradigma pembangunan merentang dari paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni, paradigma kesejahteraan, paradigma neo-ekonomi, paradigma dependensia, sampai ke paradigma pembangunan manusia. Sejalan dengan pendapat Tjokrowinoto, Suryono dalam bukunya Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan menyajikan pergeseran paradigma pembangunan dengan lebih sederhana yang tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3 Perbandingan Antar Paradigma Pembangunan**

<b>Dimensi-dimensi</b>	<b>Pembangunan Ekonomi (<i>Economic Development</i>)</b>	<b>Pembangunan Sosial (<i>Social Development</i>)</b>	<b>Pembangunan yang berpusat pada rakyat (<i>People Centered Development</i>)</b>	<b>Pembangunan yang berwawasan lingkungan (<i>Environmental Development</i>)</b>	<b>Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)</b>
<b>Tujuan</b>	Meningkatkan kapasitas/volume barang dan jasa Meningkatkan pendapatan Merubah struktur dalam industrialisasi	Meningkatkan nilai individu-individu/kemanusiaan Meningkatkan kualitas hidup Merubah struktur sosial	Memperbaiki kualitas hidup Memperbaiki keseimbangan dalam ekologi manusia	Melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia	Memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang
<b>Sistem yang Dituju</b>	Produksi dalam perindustrian	Konsumsi dan distribusi Pemenuhan kebutuhan dasar	Pemberdayaan organisasi lokal Peningkatan hak akses terhadap sumber-sumber	Lingkungan hidup sosial Lingkungan hidup binaan Lingkungan hidup alami	Produksi yang berkelanjutan Pemenuhan kebutuhan manusia Keadilan sosial dari generasi ke generasi
<b>Faktor Input</b>	Sumber-sumber daya yang relevan dan segera Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan “man-power”	Sumber marginal yang relevansinya tidak langsung Sumber manusia yang tidak nampak Keseimbangan antara SDM dengan hak azasi dan martabat manusia	Hak azasi manusia dan kemuliaan	Sumber daya alam Perubahan demografi sosial Kebutuhan dasar	Perubahan penduduk Kebutuhan dasar Pertumbuhan ekonomi Ketersediaan sumber daya alam Kualitas lingkungan hidup
<b>Proses</b>	Periode pembangunan secara relatif berjalan dengan singkat	Periode pembangunan secara relatif berjalan lama dan sukar diukur	Strategi jangka pendek mendukung jangka panjang	Periode pembangunan secara relatif berjalan singkat dan terukur	Periode pembangunan berjalan lama dan terukur
<b>Hasil yang Diharapkan</b>	Nyata dan dapat diperkirakan	Tidak nyata dan sulit diperkirakan	Periode jangka pendek nyata, tetapi jangka panjang tidak	Nyata dan dapat diperkirakan	Dapat diperkirakan sesuai dengan

			nyata dan sulit diperkirakan		skenario yang terpilih
<b>Prinsip Ekonomi</b>	Efisiensi dan masyarakat	Integrasi dan masyarakat	Integrasi dan komitmen masyarakat	Integrasi lingkungan ke dalam agenda pembangunan	Efisiensi sumber-sumber daya
<b>Prinsip Ekonomi</b>	Perdagangan bebas Saling ketergantungan spesialisasi	Saling ketergantungan dan spesialisasi dengan kesadaran kolektif dan solidaritas organik	Kemandirian Diversifikasi ekonomi Pendekatan ekonomi rakyat	Aspek lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan ekonomi	Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal dan seimbang
<b>Fokus Sektor</b>	Industrialisasi	Pelayanan dasar	Pertanian dan industri	Pengelolaan sumber daya alam	Integrasi aktivitas ekonomi, ekologi, dan sosial
<b>Partisipasi Masyarakat</b>	Sebagai tenaga kerja dan konsumen	Ikut memproduksi	Ikut merencanakan (partisipasi terlibat)	Pengelola dan penanggung jawab	Sebagai pelaksana
<b>Intervensi dari Pemerintah</b>	Lebih dominan dan feasible	Tidak terlalu kelihatan atau kurang dominan	Tidak dominan	Dominan dan didukung hukum lingkungan	Dominan sebagai perencana dan pembuat skenario pembangunan

Sumber: Suryono, 2010:23-25

Amartya Sen sebagaimana dikutip oleh Pineda (2012:2) menyatakan bahwa pembangunan manusia berkitan dengan dasar pengembangan gagasan untuk memajukan kekayaan kehidupan manusia, daripada kekayaan ekonomi dimana manusia hidup. Menurut Mahbub Ul Haq (1995:16) terdapat 4 komponen penting dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu: *equity* (kesetaraan), *sustainability* (berkelanjutan), *productivity* (produktivitas), dan *empowerment* (pemberdayaan). Keempat komponen tersebutdijabarkan sebagai berikut (Alhumami, 2009:2):

- a) Pertama, kesetaraan yang merujuk pada kesamaan dalam memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga negara. Ini mensyaratkan sejumlah hal yaitu: (1) distribusi aset-aset ekonomi produktif secara adil; (2) distribusi pendapatan melalui perbaikan kebijakan fiskal; (3) menata sistem kredit perbankan untuk memberi kesempatan bagi kelompok kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha; (4) menata sistem politik demokratis guna menjamin hak dan kebebasan politik; (5) menata sistem hukum guna menjamin tegaknya keadilan.
- b) Kedua, produktivitas yang merujuk pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Upaya ini mensyaratkan investasi di bidang sumber daya manusia, infrastruktur, dan finansial guna mendukung pertumbuhan ekonomi, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar kapasitas produksi bisa maksimal, maka investasi harus lebih difokuskan pada upaya peningkatan mutu SDM, yang ditandai oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan teknologi. SDM berkualitas memainkan peranan sentral dalam proses pembangunan suatu bangsa.
- c) Ketiga, pemberdayaan yang merujuk pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan, sehingga mereka memiliki kemandirian, otonomi dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat segala perhatian yang bertujuan bukan saja meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan, melainkan juga memperluas pilihan-pilihan publik (*public choices*) sehingga manusia mempunyai peluang mengembangkan segenap potensi yang dimiliki.
- d) Keempat, berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam mengelola dan merawat modal pembangunan: fisik, manusia, finansial, dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan guna mencapai tujuan utama pembangunan: kesejahteraan rakyat. Untuk itu, penyegaran, pembaruan, dan pelestarian modal pembangunan sangat penting dan perlu guna menjaga kesinambungan proses pembangunan dimasa depan.

### 3. Perencanaan Pembangunan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai definisi dan makna dari perencanaan pembangunan, perlu diketahui terlebih dahulu masing-masing arti dari perencanaan dan pembangunan. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan

tertentu (Tjokroamidjojo, 1989:12). Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Tarigan (2015:1) yang mendefinisikan perencanaan sebagai penetapan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara menurut Siagian (2016:4) pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2016:24). Hal ini sejalan dengan pendapat seorang ahli perencanaan pembangunan dari India yaitu M.L. Jhingan (1984) dalam Sjafrizal (2016:25) perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia dengan pendapat ahli diatas maka diaturlah regulasi yang memuat terkait perencanaan pembangunan di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



#### 4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti planologi, teknik, ekonomi, pertanian, hukum pemerintahan, dan sosial-budaya. Di samping itu, tenaga ahli tersebut sebaiknya sudah mempunyai pengalaman yang cukup dalam penyusunan perencanaan sehingga analisisnya tidak lagi terlalu bersifat teoritis yang sukar dipahami dan diterapkan oleh para birokrat dan aparatur pemerintahan. Khusus untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pemahaman terhadap kondisi daerah akan sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan yang disusun menjadi lebih operasional sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat yang tentunya sangat bervariasi antara satu dengan daerah lainnya. (Sjafrizal, 2016: 15).

Strategi pembangunan daerah pada dasarnya adalah merupakan cara atau jalan terbaik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Karena itu strategi yang baik dan tepat akan dapat menghasilkan pencapaian tujuan secara tepat dan terarah sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tentunya penetapan strategi yang tepat untuk suatu negara dan daerah akan sangat ditentukan pula oleh kondisi, potensiyang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh

negara atau daerah tersebut. Di samping itu, jumlah dan kualitas sumber daya tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah turut pula menentukan. (Sjafrizal: 2016:57).

Strategi pembangunan daerah sebaiknya dirumuskan dengan memperhatikan kondisi umum dan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan, baik yang sudah dapat dilaksanakan, maupun belum. Pertimbangan ini sangat penting artinya agar proses pembangunan tersebut dapat berjalan secara lebih terarah dan efisien sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya. Di samping itu, permasalahan pokok dan kendala yang dihadapi masyarakat setempat turut pula mempengaruhi perumusan strategi pembangunan daerah tersebut. Aspek ini perlu pula diperhatikan agar hasil yang diperoleh dari kegiatan pembangunan tersebut akan dapat pula mengatasi dan menanggulangi permasalahan pokok yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Bahkan perumusan prioritas pembangunan perlu pula memperhatikan perubahan strategis yang telah dan akan terjadi dimasa mendatang agar proses pembangunan tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi yang mungkin terjadi dimasa mendatang. (Sjafrizal, 2016: 57).

## C. Manajemen Strategis

### 1. Pengertian dan Dimensi Manajemen Strategis

Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya (David, 2009:5). Sementara menurut Pearce II dan Robinson (2007:5) dalam Rivai dan Prawironegoro (2015:1) manajemen strategis adalah satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Penggunaan istilah manajemen strategis pada bukunya Freed R. David dipakai sebagai sinonim untuk istilah perencanaan strategis. Perbedaannya adalah manajemen strategis digunakan untuk merujuk pada perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi sementara perencanaan strategis merujuk hanya pada perumusan strategi. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan (Hunger&Wheelen, 2003:4) . David (2009:6) membagi proses manajemen strategi menjadi 3 tahap yaitu:

#### a) Perumusan strategi

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Isu-isu perumusan strategi mencakup penentuan bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis apa yang tidak dijalankan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, perlukah ekspansi atau diversifikasi operasi dilakukan, perlukah perusahaan terjun ke pasar internasional, perlukah merger atau penggabungan

usaha dibuat, dan bagaimana menghindari pengambilalihan yang merugikan.

b) Penerapan strategi

Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang suport pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengeralahan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Penerapan strategi sering kali disebut “tahap aksi” dari manajemen strategis. Seringkali dianggap sebagai tahap yang paling sulit dalam manajemen strategis, penerapan atau implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal. Strategi tersebut dirumuskan, namun bila tidak diterapkan tidak ada gunanya.

c) Penilaian strategi

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Manajer mesti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang karena berbagai faktor eksternal dan internal terus-menerus berubah. Tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar adalah 1) peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, 2) pengukuran kinerja, dan 3) pengambilan langkah kolektif.

## 2. Analisis dan Pilihan Strategi

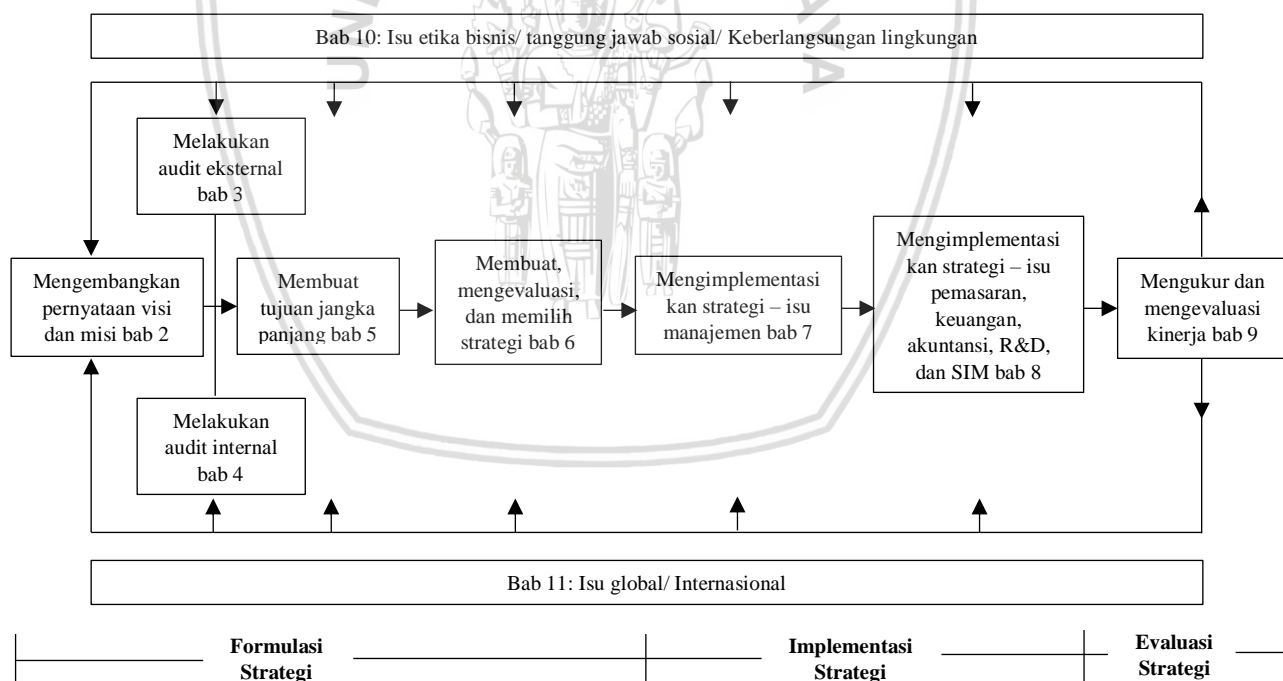
Analisis dan pilihan strategi melakukan pencarian untuk menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tujuan dan misinya (David dan David, 2017: 167). Langkah ini perlu untuk dilakukan agar tindakan alternatif yang diambil nantinya benar-benar mampu mewakili atau mendefinisikan apa yang menjadi tujuan dan misi suatu perusahaan/ instansi.

Menurut David dan David (2017:167-168) penyusunan strategi tidak perlu mempertimbangkan semua alternatif yang layak yang dapat bermanfaat bagi perusahaan, karena tidak terbatasnya tindakan yang mungkin dilakukan serta cara-cara mengimplementasikan tindakan ini.

Dalam menyusun strategi tentunya butuh melibatkan banyak stakeholder. Hal ini dilakukan agar strategi yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan mampu menjawab permasalahan yang ada.

### 3. Model Manajemen Strategis

Proses manajemen strategis akan lebih mudah dipelajari apabila disajikan dalam bentuk model/gambar. Setiap model/gambar merepresentasikan suatu proses tertentu. Dibawah ini terdapat model manajemen strategis komprehensif dari proses manajemen strategis. Relasi antar komponen proses manajemen strategis secara rinci terpapar pada model/gambar berikut:



**Gambar 2.1 Model Manajemen Strategis Komprehensif**

Sumber: David dan David, 2017: 168

Berdasarkan model/gambar diatas terlihat bahwa dalam proses manajemen strategis perumusan strategi diawali dengan melakukan

identifikasi visi dan misi. Tahap identifikasi visi dan misi hingga tahap perumusan strategi (dengan memperhatikan isu-isu global/ internasional yang sedang berkembang) termasuk ke dalam proses formulasi strategi. Proses selanjutnya yang harus dijalani dalam manajemen strategis komprehensif adalah implementasi strategi dan evaluasi strategi.

#### **D. Konsep Pembangunan Manusia (*Human Development Concept*)**

##### **1. Konsep *Sustainable Development Goals***

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau yang lebih dikenal sebagai *Global Goals* (Tujuan Global) merupakan sebuah ajakan/ panggilan universal yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan manusia ([www.undp.org](http://www.undp.org)). Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan penyempurnaan atas konsep *Millennium Development Goals* (MDGs). Kedua konsep tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan semua orang mampu menikmati kedamaian dan kemakmuran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam konsep SDGs terdapat point-point pembangunan yang terdiri sebagai berikut:

- a) *No Poverty* (Pengentasan Kemiskinan)
- b) *Zero Hunger* (Pengentasan Kelaparan)
- c) *Good Health and Well-Being* (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan)
- d) *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas)



- e) *Gender Equality* (Kesetaraan Gender)
- f) *Clean Water and Sanitation* (Air Bersih dan Sanitasi)
- g) *Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau)
- h) *Decent Work and Economic Growth* (Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak)
- i) *Industry, Innovation and Infrastructure* (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)
- j) *Reduced Inequalities* (Mengurangi Kesenjangan)
- k) *Sustainable Cities and Communities* (Keberlanjutan Kota dan Komunitas)
- l) *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)
- m) *Climate Action* (Aksi terhadap Iklim)
- n) *Life Below Water* (Kehidupan Bawah Laut)
- o) *Life on Land* (Kehidupan di Darat)
- p) *Peace, Justice and Strong Institutions* (Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian)
- q) *Partnerships for the Goals* (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Point-point pembangunan diatas selanjutnya diterjemahkan dalam 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs sendiri awal mula diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 untuk menggantikan MDGs sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs ini akan mewakili sebuah kesepakatan bersama antara 193 negara anggota yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

## 2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau yang lebih dikenal dengan *Human Development Indeks (HDI)* muncul sebagai kritikan sekaligus perbaikan terhadap penggunaan angka pendapatan per kapita sebagai ukuran kemakmuran masyarakat yang hanya terfokus pada aspek ekonomi saja. Sedangkan kemakmuran masyarakat daerah tentunya tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi kelemahan ini, muncul angka IPM, yang merupakan indeks dari kombinasi tiga unsur penting kemakmuran masyarakat, yaitu daya beli (pendapatan), pendidikan dan kesehatan masyarakat. Melalui kombinasi ini, pengukuran tingkat kemakmuran masyarakat daerah akan menjadi lebih baik dan bersifat lebih komprehensif, tidak hanya meliputi aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian aspek keadilan, kepuasan, keamanan, dan aspek lainnya yang juga merupakan unsur penting kemakmuran masyarakat masih belum tercakup dalam indeks ini.

Sebagaimana diketahui bahwa komponen yang ada dalam perhitungan IPM menurut UNDP (2001) adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat kesejahteraan, diukur dengan Umur Harapan Hidup ( $X_1$ ).

- b) Tingkat pendidikan diukur dari persentase melek huruf orang dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (bobot sepertiga) ( $X_2$ ).
- c) Daya beli (*purcahsing power*) yang diukur dari pengeluaran (konsumsi) per kapita masyarakat ( $X_3$ ).

Dengan demikian, IPM ini pada dasarnya adalah merupakan angka rata-rata sederhana dari tiga komponen di atas sehingga indeks tersebut dapat dihitung dengan formula berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{index } X_1 + \text{index } X_2 + \text{index } X_3)$$

Dimana  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  adalah lama hidup, tingkat pendidikan dan daya beli masyarakat. Sedangkan nilai dari masing-masing komponen indeks IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Index } X_{ij} = (X_{(I,j)} - X_{(i-\min)}) / (X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})$$

Dimana  $X_{(I,j)}$  indikator ke I dari daerah j,  $X_{(i-\min)}$  nilai minimum dari  $X_i$ , dan  $X_{(i-\max)}$  adalah nilai maksimum dari  $X_i$ . Hasil perhitungan IPM bergerak dari 10 – 100 dengan pengertian bahwa bila angka IPM kecil berarti kualitas sumber daya manusia masih relatif rendah dan demikian pula sebaliknya bila angka IPM lebih tinggi.

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (2017), perhitungan IPM mengalami perubahan metodologi, alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi perhitungan IPM adalah:

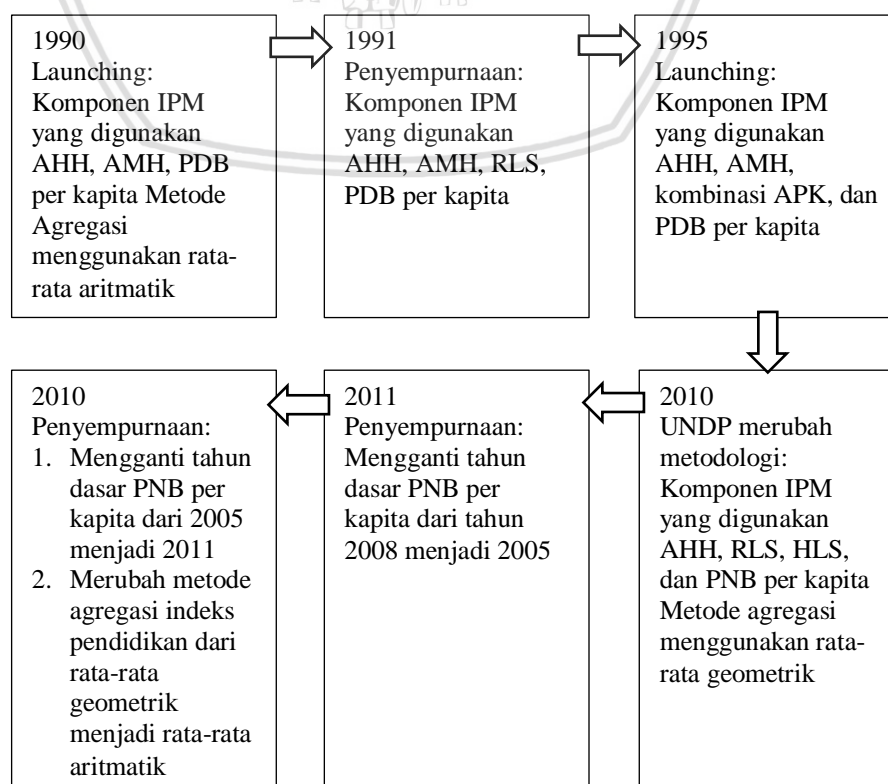
Alasan pertama:

- a) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik
- b) PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Alasan kedua: Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Berikut adalah tabel perubahan metodologi IPM dari tahun ke tahun:

**Tabel 2.4 Perubahan Metodologi IPM**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 ([www.ipm.bps.go.id](http://www.ipm.bps.go.id))

Perubahan metodologi IPM tersebut berpengaruh pada indikator dan metode perhitungan IPM. Indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Sedangkan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Untuk metode penghitungan IPM, metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) keunggulan dari perhitungan IPM dengan metode baru yaitu:

- a) Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
  - 1) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
  - 2) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- b) Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif ini dikarenakan peneliti ingin memberikan gambaran suatu fenomena atau kejadian tertentu, dalam hal ini adalah menggambarkan mengenai penyebab nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang yang berada pada tingkatan Menengah Bawah dan strategi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini sama seperti yang telah diungkapkan oleh Mely G. Tan dalam Silalahi (2009:28) bahwa:

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Sementara definisi penelitian kualitatif menurut Creswell (2007) dalam Endriani (2015:37) adalah:

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna – yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dan para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.



Pendekatan kualitatif akan mempermudah peneliti dalam hal menggali dan menafsirkan suatu fenomena yang berkaitan dengan penyebab nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang berada pada tingkatan Menengah Bawah dan strategi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif memandang suatu masalah itu sebagai hal yang holistik (menyeluruh) sehingga dibutuhkan suatu batasan. Sugiyono (2017:287) berpendapat bahwa batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang strategi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia. Fokus ini diturunkan dari komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fokus ini dipilih karena komponen dasar untuk membentuk kualitas manusia adalah melalui pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang saling berkaitan. Fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Gambaran kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Sampang saat ini dan penyebab Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang berada pada tingkatan Menengah Bawah dilihat dari 3 aspek:
  - a) Pendidikan
  - b) Kesehatan
  - c) Daya Beli

2. Strategi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia ditinjau berdasarkan proses manajemen strategi

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya suatu penelitian sedangkan situs penelitian adalah bagian dari lokasi penelitian yang merupakan letak sebenarnya peneliti melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sampang sedangkan situs dari penelitian ini terdiri dari beberapa instansi terkait seperti

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang
- 2) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang
- 3) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang
- 4) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
- 5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan Kabupaten Sampang
- 6) Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sampang adalah karena Kabupaten Sampang adalah kabupaten/kota yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah di Jawa Timur, bahkan se Pulau Jawa - Madura. Hal tersebut cukup untuk menggambarkan bagaimana kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sampang

dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Pulau Jawa – Madura. Sementara alasan peneliti mengambil situs penelitian di beberapa instansi terkait diatas adalah karena beberapa instansi diatas merupakan instansi yang memiliki data dan berhubungan dengan aspek-aspek pembangunan manusia serta yang berwenang dalam merumuskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **D. Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2012) sumber data penelitian kualitatif adalah sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti.

##### **1. Data Primer**

Menurut Silalahi (2009:289) sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original – material mentah dari pelaku yang disebut “*first – hand information*”. Secara ringkasnya data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan informan. Informan disini dianggap sebagai orang yang paling mengetahui permasalahan sebenarnya di lapangan. Peneliti menetapkan jumlah informan didasarkan pada pertimbangan waktu, tempat, dan tingkat pemahaman informan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang: Bapak Reza Bayu

selaku Kassubid Pendidikan, Kebudayaan, dan Kepemudaan serta  
Bapak Bahrul Alim selaku Kabid Ekonomi

- b) Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang: Bapak Arif Suroso  
selaku Kasie Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
- c) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindag)  
Kabupaten Sampang: Bapak Muhammad Irwan Ferdiawan selaku  
Penyuluh Perindag
- d) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang: Bapak Moedjalli selaku  
Kabag Program
- e) Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja: Ibu Madanise selaku  
Kabid Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro; Bapak  
Ludfi selaku Kasi Pelatihan dan Tenaga Kerja; serta Bapak Choirul  
Anwar selaku Sekretaris
- f) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang: Ibu Lailatul Muadzomah  
selaku Administrator Kesehatan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2009:291). Data sekunder dalam penelitian ini antara lain: penelitian terdahulu, profil Kabupaten Sampang, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sampang serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara bagaimana peneliti mendapatkan data-data penelitian. Menurut Sugiyono (2011:225) teknik pengumpulan data terbagi menjadi 4 bagian, yaitu observasi, *interview*, dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Menurut Emzir (2011:37-38) observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu”. Observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti ini dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus dengan waktu yang berbeda. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat kondisi riil dari fenomena sosial di lapangan untuk mendapatkan peristiwa yang terkait dengan strategi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah. Namun demikian, peneliti tidak terlibat langsung dengan obyek yang diamati. Peneliti hanya berperan sebagai non partisipan atau sebagai penonton terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini memakan waktu selama 6 hari yaitu mulai tanggal 17 Mei 2018 – 22 Mei 2018. Selama 6 hari tersebut, penulis melakukan pengamatan mengenai kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Sampang.

## 2. Wawancara (*interview*)

Creswell (2012) dalam Sugiyono (2017:188) menyatakan wawancara dalam penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke responden. Wawancara kepada responden/informan ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara/ *interview guide* (lihat lampiran 3). Jenis wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara seperti ini termasuk ke dalam wawancara semi terstruktur. Pada penelitian ini, pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban langsung dari narasumber terkait dengan strategi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau jawaban serinci mungkin yang berhubungan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti disesuaikan dengan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya yang kemudian akan berkembang mengikuti jawaban dari narasumber. Jawaban yang diperoleh dari narasumber tersebut kemudian direkam dan dicatat dan hasil data yang diperoleh dapat berupa catatan deskriptif/ transkrip wawancara (lihat lampiran 5).

## 3. Dokumen

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial (Bungin, 2007:124).



Selain melakukan observasi dan wawancara pengumpulan data dalam penelitian kualitatif juga dikumpulkan melalui dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mencatat dan memanfaatkan data-data atau dokumen-dokumen yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah profil lembaga, dokumen perencanaan, dan laporan kegiatan yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang; Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang; Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang; Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang; Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang; serta dokumen lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2017:148) adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

##### **1. Peneliti itu sendiri**

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2017:306). Peran

peneliti sebagai instrumen penelitian yang utama adalah bertugas mengamati dan menyaksikan objek atau fenomena yang akan diteliti. Sehingga data yang terkumpul nantinya juga sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menangkap fenomena-fenomena di lapangan.

## 2. *Interview Guide*/ Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara atau *interview guide* adalah sebuah alat yang digunakan oleh peneliti ketika terjun lapangan yang berisikan daftar pertanyaan. Pedoman wawancara ini berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan dan membatasi peneliti ketika melakukan observasi dan wawancara agar tidak keluar dari fokus penelitian yang sudah ditetapkan di awal.

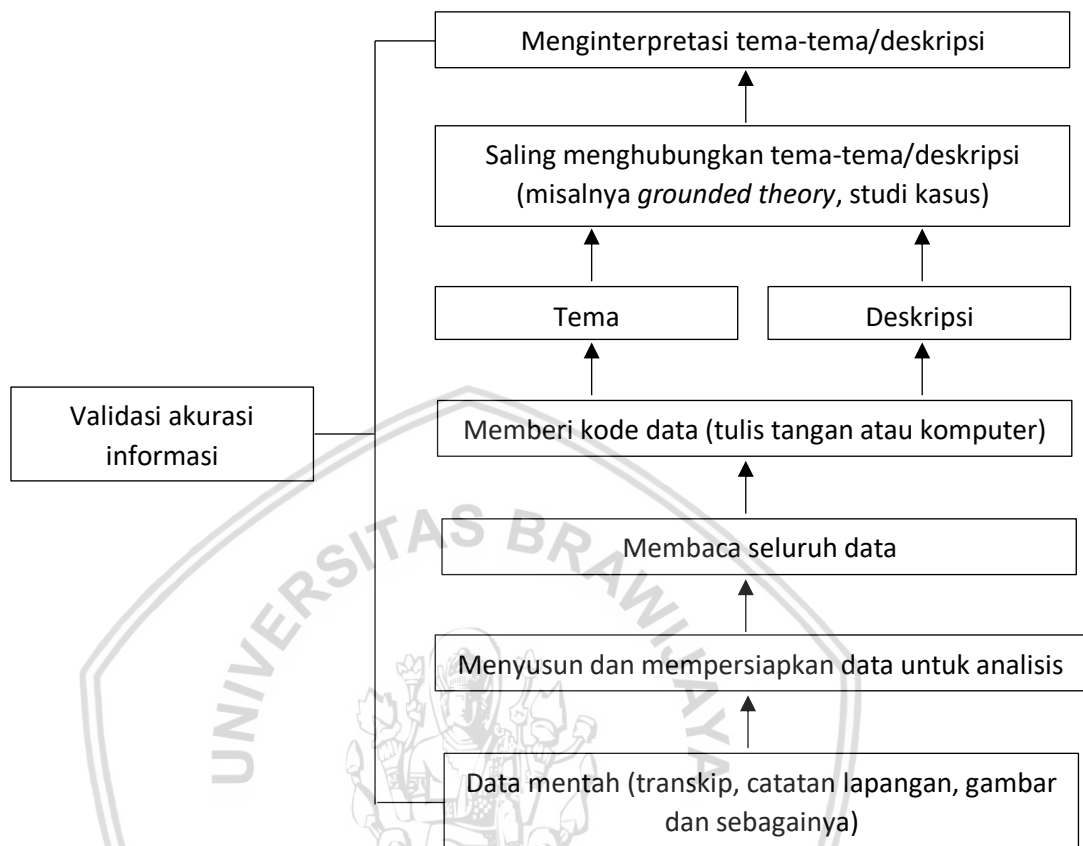
## 3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- b) Tape recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan.
- c) Kamera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/ sumber data.

## G. Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2017:332) berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu analisis data model John W. Creswell dan analisis deskriptif SWOT. Secara definisi menurut David (2009:327) analisis deskriptif SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi: strategi SO (kekuatan-peluang), strategi WO (kelemahan-peluang), strategi ST (kekuatan-ancaman), dan strategi WT (kelemahan-ancaman). Sementara analisis data menurut Creswell adalah analisis data yang mengilustrasikan pendekatan linear dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas namun dalam praktiknya lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Secara lebih rinci analisis data model Creswell disajikan dalam gambar berikut:



**Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif**  
Sumber: Creswell (2016:263)

Komponen-komponen diatas berhubungan antara satu dengan lainnya, hingga didapat suatu kesimpulan. Dengan begitu mengolah data dan menganalisis data adalah mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna dan dapat menghasilkan kesimpulan (Arikunto, 2010:53).

**Langkah 1.** Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung informasi. Pada tahap ini, peneliti akan

mempersiapkan data yang relevan dengan strategi peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Sampang.

**Langkah 2.** Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti menulis catatan atau gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai strategi peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Sampang.

**Langkah 3.** Memulai *coding* semua data. *Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas (Rossman dan Rallis, 2012). Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat (paragraf) atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (disebut istilah *in vivo*). Pada tahap ini, peneliti memilah-milah data yang termasuk dalam sub tema strategi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia.

**Langkah 4.** Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* (ranah) tertentu. Pada tahap ini peneliti menyampaikan informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau

peristiwa dalam keadaan tertentu yang ada dalam proses penelitian tentang strategi peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Sampang.

**Langkah 5.** Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu (lengkap dengan beberapa subtema, ilustrasi khusus, perspektif dan kutipan), atau tentang keterhubungan antar tema. Peneliti menyajikan hasil analisis melalui pendekatan naratif terkait strategi peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Sampang.

**Langkah 6.** Langkah terakhir dalam analisis data adalah pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data. Dalam hal ini peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi/ pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya: pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis dan bukan dari hasil ramalan peneliti. Dalam tahap terakhir, peneliti akan memberikan interpretasi subjektif dan mengkaitkannya dengan teori terkait strategi peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Sampang.



## H. Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi salah satu komponen penting dalam penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menguji kebenaran suatu data yang diperoleh. Teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2007:327) yaitu “perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian”. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi data dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengecek kembali derajat kebenaran dan kepercayaan suatu data melalui pemeriksaan kembali terhadap suatu fenomena, data dan informasi dengan menggunakan metode dan sumber yang berbeda. Terdapat 3 jenis triangulasi yang dapat dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan pengamatan, apa yang dikatakan dengan situasi penelitian sepanjang waktu, pandangan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi terkait.
2. Triangulasi metode, dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi teori, dilakukan dengan mengurai pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari penjelasan pembandingan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Secara umum wilayah Kabupaten sampang berupa daratan, terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau Mandangin/ Pulau Kambing.

##### a. Aspek Geografi

Kabupaten Sampang memiliki luas wilayah sebesar 1.233,33 km<sup>2</sup> atau seluas 23,86% dari luas Pulau Madura yang luasnya sebesar 5.168 km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kabupaten Sampang tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Sampang yang terbagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/kelurahan. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 km<sup>2</sup> merupakan kecamatan terluas, sedangkan kecamatan terkecil adalah Pengarengan dengan luas hanya 42,7 km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Sampang terletak  $\pm 100$  km dari Surabaya, yang dapat ditempuh melalui Jembatan Suramadu kurang lebih 5 menit dan dilanjutkan dengan perjalanan darat  $\pm 1,5$  jam. Secara astronomis, kabupaten ini terletak pada  $130^{\circ}08'$  hingga  $113^{\circ}39'$  Bujur Timur dan  $06^{\circ}05'$  hingga  $07^{\circ}13'$  Lintang Selatan. Karena lokasi Kabupaten Sampang berada disekitar garis khatulistiwa, maka seperti kabupaten lainnya di Madura, wilayah ini mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahun, musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai Maret merupakan musim penghujan sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September.

Rata-rata curah hujan di Kabupaten sampang adalah sekitar 91,78 mm/tahun, sedangkan rata-rata jumlah hari hujan mencapai 6,47 hh/tahun. Berdasarkan data yang ada curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungdung yakni 173,58 mm/tahun, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Sreseh. Sedangkan untuk rata-rata hari hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Omben dan Ketapang, sedang yang terendah terdapat di Kecamatan Sokobanah dan Kedungdung. Rata-rata curah hujan bulanan tertinggi terdapat di Kecamatan Omben dan Banyuates, sedang yang terendah terdapat di Kecamatan Camplong dan Pengarengan. Bulan-bulan dengan curah hujan tinggi terjadi pada Juli dan Desember, sedang bulan dengan curah hujan paling rendah terjadi pada Juni dan Agustus.

Kondisi topografi di Kabupaten Sampang digambarkan memlalui kelerengan beberapa wilayahnya. Kelerengan wilayah Kabupaten

Sampang bervariasi antara datar, bergelombang, curam dan sangat curam dimana klasifikasi kelerengan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kelerengan 0-8% meliputi luas 37.785,64 Ha atau 31,40% dari luas wilayah keseluruhan kecuali daerah genangan air, pada wilayah ini sangat baik untuk pertanian tanaman semusim.
- 2) Kelerengan 9-15% meliputi luas 67.807,14 Ha atau 53,86% dari luas wilayah keseluruhan, baik sekali untuk usaha pertanian dengan tetap mempertahankan usaha pengawetan tanah dan air. Selain itu pada kemiringan ini cocok juga untuk konstruksi/permukiman.
- 3) Kelerengan 16-40% meliputi luas 17.737,22 Ha atau 14,38% dari luas wilayah keseluruhan. Daerah tersebut baik untuk pertanian tanaman keras/tahunan, karena daerah tersebut mudah terkena erosi dan kapasitas penahan air yang rendah. Karenanya lahan ini pun tidak cocok untuk konstruksi.

Secara rinci gambaran luas daerah di Kabupaten Sampang berdasarkan kecamatan dan kemiringan tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Luas Wilayah (Ha) Menurut Kecamatan dan Kemiringan Tanah di Kabupaten Sampang**

No	Kecamatan	Luas (Ha) Berdasarkan Kemiringan			Jumlah
		(0-8)%	(9-15)%	(16-40)%	
1	Sereseh	2.721,00	4.474,00	-	7.195,00
2	Torjun	2.615,00	1.725,50	78,50	4.419,00
3	Pengarengan	2.595,63	1.674,37	-	4.270,00
4	Sampang	5.849,63	985,75	165,62	7.001,00
5	Camplong	5.099,00	1.866,00	28,00	6.993,00

6	Omben	3.530,93	5.308,92	2.791,15	11.631,00
7	Kedungdung	3.370,60	7.576,40	1.362,00	12.308,00
8	Jrengik	3.349,00	2.240,00	946,00	6.535,00
9	Tambelangan	3.411,50	4.565,00	1.020,50	8.997,00
10	Banyuates	2.823,50	9.407,50	1.892,00	14.123,00
11	Robatal	301,50	7.364,50	398,00	8.064,00
12	Karang Penang	81,50	7.400,50	943,00	8.425,00
13	Ketapang	1.173,28	5.580,70	5.774,02	12.528,00
14	Sokobanah	863,57	7.638,00	2.339,43	10.841,00
Kabupaten Sampang		37.785,64	67.807,14	17.737,22	123.330,00

Sumber: Kabupaten Sampang dalam Angka, 2017

Berdasarkan kondisi geologinya, Kabupaten sampang terdiri atas 5 macam batuan yaitu alluvium, pliosen fasies sedimen, plistosen fasies sedimen, pliosen fasies batu gamping, dan mioses fasies sedimen. Jenis geologi alluvium dan mioses fasies sedimen banyak digunakan oleh masyarakat untuk tegalan dan sawah, serta sebagian kecil jenis batun plistosen fasies sedimen yang seluruhnya untuk tegalan.

Kabupaten Sampang memiliki sungai yang sebagian besar merupakan sungai musiman yang ada airnya pada musim penghujan. Kabupaten Sampang memiliki 34 buah sungai yang mana dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Kabupaten Sampang Selatan terdapat 25 sungai, yaitu:

Sungai Pangetokan, Sungai Legung, Sungai Kalah, Sungai Tambak Batoh, Sungai Taddan, Sungai Gunung Maddah, Sungai Sampang, Sungai Kamoning, sungai Madunan, Sungai Gelurang, Sungai Gulbung, Sungai Lampenang, Sungai Cangkremaan, Sungai Cangkokan, Sungai Pangarengan, Sungai Kepang, Sungai



Klampis, Sungai Dampol, Sungai Sumber Koneng, Sungai Kati, Sungai Pelut, Sungai Jelgung.

2) Kabupaten Sampang Utara terdapat 9 sungai, yaitu:

Sungai Pajagan, sungai Dempo Abang, Sungai Sumber Bira, Sungai Sewaan, Sungai Sodung, Sungai Mading, Sungai Rabian, Sungai Brambang dan Sungai Sumber Lanjang.

Sungai yang mengalir sepanjang tahun antara lain:

- 1) Sungai Klampis dengan Waduk Klampis yang dapat dipergunakan untuk mengalir sawah di Kecamatan Torjun, Sampang dan Jrengik.
- 2) Sungai Marparan dan Disanah bermuara di Kali Blega, sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan telah banyak dimanfaatkan untuk tambak di penggaraman.

b. Aspek Demografi

Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Sampang secara keseluruhan umumnya tidak merata. Persebaran penduduk umumnya mengikuti dan cenderung berorientasi ke wilayah/daerah yang memiliki aktivitas lebih ramai atau terdapat potensi sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, perdagangan dan jasa. Demikian juga dengan kepadatan penduduk, kepadatan penduduk cenderung terkonsentrasi atau lebih tinggi pada daerah perkotaan karena daerah tersebut merupakan pusat aktivitas menarik penduduk untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.

Jumlah penduduk Kabupaten Sampang pada akhir tahun 2015 sebanyak 919.825 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 457.850 jiwa dan penduduk perempuan 461.965 jiwa dengan angka kepadatan penduduk sebesar 706,67 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sampang dan Kedungdung, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pengarengan. Berikut adalah jumlah penduduk di Kabupaten Sampang berdasarkan kecamatan tahun 2015:

**Tabel 4.2 Mutasi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang Tahun 2015**

No	Kecamatan	Penduduk Awal Tahun	Mutasi				Penduduk Akhir Tahun
			Lahir	Mati	Pindah	Datang	
1	Sreseh	35.242	489	258	515	199	35.154
2	Torjun	37.502	1.095	112	379	112	38.218
3	Pengarengan	20.750	271	54	158	58	20.867
4	Sampang	117.528	496	308	858	421	117.279
5	Camplong	90.175	868	162	843	372	90.410
6	Omben	96.261	1.265	278	1.250	608	96.606
7	Kedungdung	106.305	423	10.834	10.922	175	85.147
8	Jrengik	34.420	754	225	512	327	34.764
9	Tambelangan	51.749	94	133	456	174	51.428
10	Banyuates	74.060	1.561	748	89	225	75.009
11	Robatal	54.341	174	135	96	28	54.312
12	Karang Penang	68.205	494	104	72	175	68.698
13	Ketapang	86.120	321	1.461	1.454	107	83.633
14	Sokobanah	67.978	217	211	158	119	67.945
Kabupaten Sampang		940.636	8.522	15.023	17.762	3.100	919.473

Sumber: Kabupaten Sampang dalam Angka 2017

Sementara untuk melihat komposisi jumlah penduduk Kabupaten Sampang per kecamatan dari tahun 2012 – 2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2012 - 2015**

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015
1	Sreseh	35.303	35.252	35.242	35.157
2	Torjun	35.542	35.959	37.502	38.218
3	Sampang	117.227	117.475	117.528	117.279
4	Camplong	81.722	81.243	90.175	90.410
5	Omben	77.157	77.231	96.261	96.606
6	Kedungdung	86.277	86.264	106.305	85.499
7	Jrengik	33.476	33.362	34.420	34.764
8	Tambelangan	52.306	52.235	51.749	51.428
9	Banyuates	73.625	73.814	74.060	75.009
10	Robatal	54.140	54.932	54.341	54.312
11	Sokobanah	64.251	64.431	67.978	67.945
12	Ketapang	84.223	84.620	86.120	83.633
13	Pangarengan	20.484	20.627	20.750	20.867
14	Karangpenang	67.549	67.649	68.205	68.698
		883.282	885.313	940.636	919.825

Sumber: RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2017 diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara general jumlah penduduk Kabupaten Sampang dari tahun 2012 – 2015 cenderung fluktuatif. Dari tahun 2012 – 2014 rata-rata jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan sementara dari tahun 2014 – 2015 jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Sampang mengalami penurunan.

## **2. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang**

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam menunjang suatu kegiatan maupun program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Kondisi sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan, kesehatan maupun perekonomian di Kabupaten Sampang terangkum dalam data berikut:

**Tabel 4.4 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten****Sampang Tahun 2016/2017**

No	Nama Kecamatan	TK	SD Negeri	SD Swasta	MI(*)	SLTP Negeri	SLTP Swasta	MTs	SLTA/SMK Negeri	SLTA/SMK Swasta	MA
1	Sreseh	10	26	-	17	2	3	7	1	3	3
2	Torjun	4	31	-	13	4	4	7	1	3	1
3	Pangarengan	3	18	-	2	3	1	4	-	3	1
4	Sampang	11	65	10	18	9	18	17	7	13	9
5	Camplong	9	46	6	15	5	9	22	-	9	11
6	Omben	16	46	8	50	4	12	29	2	6	13
7	Kedungdung	21	45	13	62	5	26	30	1	13	8
8	Jrengik	14	37	-	12	4	3	3	1	1	1
9	Tambelangan	10	34	8	22	3	16	8	1	8	2
10	Banyuates	10	53	5	40	4	14	19	1	9	11
11	Robatal	25	25	4	46	3	14	20	1	6	4
12	Karang Penang	29	21	6	77	2	23	21	-	16	6
13	Ketapang	50	44	10	60	4	23	19	1	12	7
14	Sokobanah	30	47	5	51	2	11	17	-	6	6
Jumlah		242	538	75	485	54	177	223	17	108	83

Keterangan:

(\*) Tahun 2015/2016

Sumber: Kabupaten Sampang dalam Angka Tahun 2017, diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persebaran sarana dan prasarana pendidikan mulai dari TK hingga SLTA/SMK/MA tersebar di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Total jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sampang tahun 2016/2017 yaitu 242 Taman Kanak-kanak, 538 Sekolah Dasar Negeri Inpres, 75 Sekolah Dasar Swasta, 485 Madrasah Ibtidaiyah, 54 SLTPertama Negeri, 177 SLTP Swasta, 223 Madrasah Tsanawiyah, 17 SLTA/SMK Negeri, 108 SLTA/SMK Swasta, dan 83 Madrasah Aliyah. Dengan jumlah total sarana dan prasarana pendidikan serta persebarannya yang merata disetiap

kecamatan, maka akan memudahkan masyarakat Kabupaten Sampang untuk mengakses pendidikan.

Selain sarana dan prasarana pendidikan, di Kabupaten Sampang terdapat juga sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sampang terangkum dalam data berikut:

**Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Sampang Tahun 2016**

No	Sarana Kesehatan	Angka/Nilai/Jumlah	Satuan
1	Rumah Sakit Umum	1,00	RS
2	Rumah Sakit Khusus	-	
3	Puskesmas Rawat Inap	-	
4	Puskesmas Rawat Non-Rawat Inap	-	
5	Puskesmas Keliling	-	
6	Puskesmas Pembantu	-	
7	Apotek	29,00	Apotek
8	RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 1	100,00	%
9	Posyandu	1.020,00	Posyandu
10	Posyandu Aktif	78,92	%
11	Rasio posyandu per 100 balita	1,33	Per 100 balita
12	UKBM		
13	Poskesdes	186,00	Poskesdes
14	Polindes	270,00	Polindes
15	Posbindu	22,00	Posbindu
16	Desa Siaga	186,00	Desa
17	Persentase Desa Siaga	100,00	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa meskipun hanya terdapat 1 Rumah Sakit di Kabupaten Sampang namun sudah ada 186 Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang tersebar disetiap desa yang ada di Kabupaten Sampang. Selain Poskesdes di Kabupaten Sampang juga terdapat 1.020 Posyandu, 270 Polindes dan 22 Posbindu. Tersedianya Poskesdes,

Posyandu, Polindes, dan Posbindu dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat dengan akses kesehatan. Di Kabupaten Sampang juga terdapat Desa Siaga yang berjumlah 186 desa. Desa Siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri.

Sementara untuk sarana dan prasarana dibidang perekonomian, di Kabupaten sampang terdapat beberapa lembaga usaha yang secara rinci terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Jumlah Lembaga Usaha di Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2016**

No	Lembaga Usaha	2013	2014	2015	2016
1	Koperasi Aktif	389	395	400	247
2	Koperasi	439	449	442	446
3	UMKM Aktif non BPR/LKM	26.880	27.130	27.410	27.660
4	Jumlah BPR/LKM Aktif	6	8	10	10

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 4 lembaga usaha di Kabupaten Sampang diantaranya yaitu Koperasi Aktif, Koperasi, UMKM Aktif non BPR/LKM, dan BPR/LKM Aktif. Untuk jumlah keberadaan Koperasi dan Koperasi Aktif di Kabupaten Sampang cenderung fluktuatif dari tahun 2013 – 2016. Sementara untuk jumlah BPR/LKM Aktif dan UMKM Aktif non BPR/LKM cenderung meningkat dari tahun 2013 – 2016. Adanya lembaga-lembaga usaha tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Sampang dalam



mengakses modal usaha agar lebih mandiri dan mampu membuka usaha sendiri.

### 3. Gambaran Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam kategori kabupaten tertinggal tahun 2015-2019 yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang telah menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan, utamanya terkait pembangunan manusia. Kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Sampang tergambar pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM Kabupaten Sampang dari tahun 2012 – 2016 beserta komponen pembentuknya secara rinci tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 4.7 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

#### **Kabupaten Sampang Tahun 2012 - 2017**

<b>Tahun</b>	<b>AHH</b>	<b>IK</b>	<b>EYS</b>	<b>MYS</b>	<b>IP</b>	<b>PPP</b>	<b>IPM</b>
2012	67,43	0,73	9,86	3,27	0,38	7.692	55,78
2013	67,46	0,73	10,20	3,34	0,39	7.769	56,45
2014	67,48	0,73	10,39	3,49	0,40	7.798	56,98
2015	67,58	0,73	11,09	3,65	0,43	7.827	58,18
2016	67,62	-	11,37	3,79	-	8.096	59,09
2017	67,67	-	11,38	4,12	-	8.352	59,90

Ket:

AHH : Angka Harapan Hidup

IK : Indeks Kesehatan

EYS : Angka Harapan Sekolah

MYS : Rata-rata Lama Sekolah

IP : Indeks Pendidikan

PPP : Kemampuan Daya Beli

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa IPM Kabupaten Sampang berada pada rentang nilai 55 – 59 yang jika disandingkan dengan standart

menurut UNDP maka Kabupaten Sampang memiliki IPM yang berada pada tingkatan Menengah Bawah. Jika dijabarkan menurut komponen pembentuknya, diketahui bahwa berdasarkan tabel diatas Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sampang dari tahun 2012 – 2017 berada pada rentang nilai 67,43 – 67,67. Artinya usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Sampang rata-rata sampai usia 67 hingga 68 tahun. Sementara Indeks Kesehatan Kabupaten Sampang dari tahun 2012 – 2015 cenderung stagnan yaitu 0,73. Indeks Kesehatan didapat dari hasil akumulasi indeks fertilitas (kemampuan untuk hamil dan berhasil melahirkan bayi hidup), indeks morbiditas (derajat sakit, cedera atau gangguan), dan indeks mortalitas (angka kematian dan kesakitan). Untuk Angka Harapan Sekolah (EYS) Kabupaten Sampang dari tahun 2012 – 2017 berada pada rentang nilai 9,86 – 11,38 yang artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk usia sekolah (usia 7 – 25 tahun) Kabupaten Sampang di masa mendatang adalah selama 9,86 – 11,38 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMP (tepatnya kelas 1 SMA) hingga kelas 2 SMA. Untuk Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Kabupaten Sampang dari tahun 2012 – 2017 berada pada rentang nilai 3,27 – 4,12 yang artinya bahwa rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani adalah sebesar 3,27 – 4,12 tahun atau setara dengan SD kelas 3 dan 4. Untuk Indeks Pendidikan (IP) Kabupaten Sampang dari tahun 2012 – 2015 berada pada rentang nilai 0,38 – 0,43. Indeks Pendidikan merupakan akumulasi perhitungan dari angka melek

huruf dan rata lama sekolah. Untuk Kemampuan Daya Beli (PPP) Kabupaten Sampang dari tahun 2012 – 2017 berada pada rentang nilai 7.692 – 7.827 yang artinya bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Sampang adalah sebesar 7.692/kapita/tahun – 8.352/kapita/tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nilai kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Sampang tersebut masih jauh dibatas minimum, bahkan jauh dibawah dua kali garis kemiskinan terendah di Indonesia.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Penyebab Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang Berada pada Tingkatan Menengah Bawah**

#### **a) Aspek Pendidikan**

Faktor penyebab pembangunan manusia di Kabupaten Sampang berada pada tingkatan menengah bawah yang pertama adalah dilihat dari aspek pendidikan. Hal ini didasarkan dari komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah satunya adalah pendidikan. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Reza Bayu selaku Kassubid Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan Bappelitbangda Kabupaten Sampang diketahui bahwa:

“..Rata-rata lama sekolah di Sampang itu masih 4,12 ya rata-rata pernah saya buka, komanya saya ngga hapal... Nah itu faktor.. rata-rata lama sekolah itu yang usianya diatas 25 tahun kan ya. Itu yang usia diatas 25 tahun, masyarakat yang dulu-dulu, para pendahulu kita memang banyak yang putus sekolah..” (wawancara dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Sampang untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani adalah sebesar 4,12 tahun atau setara dengan kelas 4 SD. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kabupaten Sampang yang usianya 25 tahun keatas dahulunya banyak yang putus sekolah. Sehingga hal tersebut mempengaruhi perhitungan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Sampang.

Masalah pendidikan masyarakat Kabupaten Sampang yang masih rendah tersebut sebenarnya bisa dientaskan. Hanya saja hal tersebut menjadi sulit untuk terealisasi karena adanya masalah yang muncul dari dalam diri masyarakat Kabupaten Sampang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Moedjali selaku Kabag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang:

“Nah ini kendalanya, tidak semua, katakanlah kita sudah punya dana tidak semua orang mau mbak. Ya apa paak sudah gitu aja.. kendalanya disitu. Sosial ekonomi kendalanya disitu, kalau sudah punya uang orang belum tentu mau, kalau sudah tua” (wawancara dengan Dinas Pendidikan pada tanggal 18 Mei 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa kendala yang muncul akibat dari rendahnya pendidikan masyarakat Kabupaten Sampang berasal dari dalam Sumber Daya Manusianya itu sendiri. Meskipun program pendidikan dan anggaran untuk pendidikan sudah tersedia namun tidak semua masyarakat Kabupaten Sampang mau untuk mengikuti program pendidikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat. Usia lah yang menjadi alasan utama

masyarakat setempat tidak mau melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, animo yang berkembang dimasyarakat bahwa tidak akan ada perubahan yang berarti sekalipun masyarakat setempat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Artinya mata pencaharian masyarakat akan tetap sama dengan ketika sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Moedjali selaku Kabag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang:

“Itulah yang, sebab dia merasa kalau sekolah juga tidak ada pengaruhnya (terhadap pekerjaan mereka)” (wawancara dengan Dinas Pendidikan pada tanggal 18 Mei 2018)

Meskipun kendala-kendala tersebut terlalu kompleks untuk diselesaikan karena faktor penghambatnya berasal dari dalam diri masyarakatnya sendiri namun pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terus melakukan berbagai upaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Reza Bayu selaku Kassubid Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan Bappelitbangda Kabupaten Sampang:

“Sebenarnya faktor utama ya itu yang usia diatas 25 tahun yang sisa-sisa pendahulu kita. Itupun walau bagaimanapun.. itu yang usia diatas 40 tahun walaupun kita mau push di buta aksara nasional ataupun kejar paket A paket B, otak mereka sudah tidak mampu ya. Sebenarnya kalau program pemerintah yang kejar paket itu banyak sebenarnya anggarannya cuma mereka-mereka itu kalau menurut dilapangan sudah tidak mampu lagi, untuk mencapai kesana.” (wawancara dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Dari kutipan wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sampang sebenarnya sudah memiliki program pendidikan

lanjutan bagi masyarakat usia 25 tahun keatas yang belum menamatkan pendidikannya. Program tersebut berupa kejar paket A dan paket B selain itu ada juga program buta aksara nasional dari pemerintah pusat. Saat ini Bappelitbangda Kabupaten Sampang selaku koordinator program dan kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan sedang mengupayakan agar masyarakat Kabupaten Sampang mau untuk mengikuti kejar paket.

b) Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan faktor penyebab lainnya yang menyebabkan pembangunan manusia di Kabupaten Sampang berada pada tingkatan menengah bawah. Permasalahan yang muncul pada aspek kesehatan bisa dikatakan merupakan bagian dari efek domino yang ditimbulkan dari rendahnya pendidikan di Kabupaten Sampang. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Lailatul Muadzomah selaku Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang:

“Yang mempengaruhi angka harapan hidup? Itu sebenarnya.. kalau dilihat dari.. ya karena pendidikan mereka yang rendah, mereka tidak tahu (program-program kesehatan). Bagi mereka itu, ya faktor budaya itu yang masih ada di masyarakat.” (wawancara dengan Dinas Kesehatan pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Sampang dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan masyarakat Kabupaten Sampang. Sehingga masyarakat Kabupaten Sampang tidak mengetahui terkait adanya program-program kesehatan yang ada di Kabupaten Sampang. Hal tersebut berkaitan juga dengan animo dan budaya yang



berkembang di masyarakat Kabupaten Sampang, bahwa masyarakat disana lebih mempercayai pengobatan alternatif (dukun) jika dibandingkan dengan pengobatan medis apabila ada keluarga yang sakit.

Adanya budaya yang berkembang dalam masyarakat terkait kepercayaan pada pengobatan alternatif (non medis) tersebut diperparah dengan kondisi geografis Kabupaten Sampang dalam hal ketersediaan akses air bersih. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Lailatul Muadzomah selaku Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk ketersediaan akses air bersih itu tidak merata. Ada daerah di kabupaten kota ini di kotanya mudah sampai banjir tapi ada daerah yang sangat sulit, jadi tidak merata. Dan termasuk kurang baik penyediaan air bersihnya.” (wawancara dengan Dinas Kesehatan pada tanggal 21 Mei 2018)

Tidak meratanya akses air bersih pada beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang disebabkan oleh bencana alam banjir. Kondisi geografis Kabupaten Sampang yang berada pada 15 mdpl ([www.jatim.bps.go.id](http://www.jatim.bps.go.id)) telah menyebabkan Kabupaten Sampang sering dilanda bencana banjir ketika musim penghujan. Adanya bencana banjir tersebut yang kemudian berdampak pada ketersediaan air bersih, sebab luapan air bah tersebut akan mencemari sumber mata air bersih yang ada.

Beberapa kendala yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sampang tersebut khususnya dalam aspek kesehatan pada dasarnya

masih bisa diatasi. Secara infrastruktur (sarana dan prasarana) kesehatan Kabupaten Sampang telah memiliki akses kesehatan yang cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Lailatul Muadzomah selaku Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang berikut:

“(akses kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Sampang) Sangat mudah, karena kita sudah punya 21 puskesmas dan punya 260 polindes 89 pustu yang merupakan jejaringnya Dinas Kesehatan.” (wawancara dengan Dinas Kesehatan pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa akses kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Sampang sangatlah mudah. Kemudahan tersebut disebabkan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Secara data empiris di Kabupaten Sampang terdapat 21 Puskesmas, 260 Polindes, dan 89 Pustu yang merupakan jejaring dari Dinas Kesehatan. Adanya Puskesmas, Polindes, dan Pustu tersebut dalam rangka mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat. Artinya yang tidak terjangkau setidaknya masih bisa dilayani di Puskesmas, Polindes maupun Pustu.

Selain tersedianya sarana dan prasarana kesehatan hingga sampai ke desa (dalam hal ini Polindes), pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sampang juga sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lailatul Muadzomah selaku Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang berikut:

“Kalau untuk masyarakat semuanya mudah, sekiranya dilapangan itu misalnya ada yang merasa dipersulit ini terkait persyaratan.

Selama kita itu, kalau di masyarakat miskin kita kan ada kita punya aturan, kita melalui desa ada BPJS. Itu ada aturan misalnya harus punya KTP harus sesuai dengan KK, nah itu yang sulit. Kita tau kondisi masyarakat kita disini banyak yang tidak punya KTP banyak yang tidak punya KK, baru kalau sakit mereka mengurus itu semuanya itu yang merasa membuat sulit. Selain itu juga untuk masyarakat miskin kita hanya fokus di pelayanan sehingga pendataan untuk warga miskin kita tidak ikut-ikut, Dinas Sosial. Kita hanya menerima nama saja, termasuk kita tidak ikut pendistribusian kartu, BPJS kita tidak ikut-ikutan. Jadi kondisinya itu disini banyak dari mereka yang miskin tidak punya kependudukan mereka juga nggak pegang BPJS. Padahal sebenarnya mereka sudah pegang kartu BPJS sudah selesai (permasalahan). Nah kita tidak ikut-ikutan disitu, kita fokus di pelayanan, kita untuk klaim itu harus ada beberapa prosedur persyaratan harus patuhi itu.” (wawancara dengan Dinas Kesehatan pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa kemudahan akses kesehatan di Kabupaten Sampang tidaklah pandang bulu, baik itu untuk masyarakat miskin maupun kaya semuanya mudah. Jikapun muncul kendala dilapangan, hal tersebut justru berkaitan dengan persyaratan pengurusan BPJS. Sementara yang terjadi dilapangan masyarakat kurang mampu (miskin) banyak yang belum memiliki dokumen-dokumen kependudukan (seperti KTP, KK, Akta kelahiran dsb) sehingga hal tersebutlah yang menghambat pengurusan BPJS dan berdampak pada terhambatnya penanganan pasien. Pihak rumah sakit, puskesmas maupun penyedia sarana dan prasarana kesehatan lainnya tidak dapat berbuat banyak karena itu sudah menjadi prosedur persyaratan yang harus dipenuhi.

c) Aspek Daya Beli

Faktor penyebab pembangunan manusia di Kabupaten Sampang berada pada tingkatan menengah bawah yang terakhir adalah

disebabkan oleh kemampuan daya beli yang rendah. Berdasarkan wawancara penulis dengan dengan Bapak Bahrul Alim selaku Kabid Ekonomi Bappelitbangda Kabupaten Sampang diketahui bahwa:

“Faktor penyebab utamanya ya mbak di pendidikan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan di Sampang itu biasanya dijual dalam bentuk mentah, masih mentah, belum ada pengolahan-pengolahan lagi.” (wawancara dengan Bappelitbangda pada tanggal 21 Mei 2018)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat yang rendah berdampak pada produk yang dihasilkan. Ketika pendidikan masyarakat rendah maka masyarakat cenderung pasrah dan kurang inovasi, sehingga produk yang dijual masih dalam bentuk mentah atau belum diolah. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada nilai jual produk yang bersangkutan. Harga jual produk yang masih mentah akan berbeda dengan harga jual produk yang sudah diolah sehingga akan berpengaruh juga pada pendapatan masyarakat.

Rendahnya harga jual produk-produk yang ada di Kabupaten Sampang mengakibatkan kontribusi PDRB dari sektor-sektor pertanian maupun perdagangan di Kabupaten Sampang ikut rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Bahrul Alim selaku Kabid Ekonomi Bappelitbangda Kabupaten Sampang diketahui bahwa:

“Untuk di sektor pertanian ini jika kita lihat dari komposisi penduduk Sampang ini 58,2% adalah sektor pertanian. Di sektor pertanian ini kan meliputi, secara umum mbak, meliputi pertanian kemudian perkebunan kemudian perikanan, peternakan juga masuk. Kalau di perdagangan ya ini memang kontribusinya ada 14,5%. Dari 58,2% tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian kontribusinya terhadap PDRB cuma 3,4 dari separuh dari potensi yang semestinya, yang dimiliki oleh

Sampang.” (wawancara dengan Bappelitbangda pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa komposisi penduduk Kabupaten Sampang yang bekerja disektor pertanian adalah sebesar 58,2%. Sektor pertanian ini meliputi perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sementara komposisi penduduk Kabupaten Sampang yang bekerja disektor perdagangan adalah sebesar 14,5%. Kontribusi terhadap PDRB yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja disektor pertanian hanyalah sebesar 3,4% dari separuh potensi yang semestinya dimiliki oleh Kabupaten Sampang.

Meskipun harga jual produk-produk masyarakat Sampang dan kontribusi terhadap PDRB rendah, namun pemerintah daerah Kabupaten Sampang telah melakukan beberapa usaha. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Madanise selaku Kabid Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang berikut:

“Kemudian juga kita tingkatkan dengan kita bekerjasama dengan dinas teknis. Seperti misalnya kesehatan, misalnya kecamatan. Kalau kecamatan itu berkenaan dengan PISP nya itu izin (usaha) rumah tangganya, kalau kecamatan berkenaan dengan izin usaha mikro nya, karena mereka harus mempunyai legalitas yang kuat, itu ada dari sisi produksi. Dari sisi pasar apa? Kita punya satu program, program berkenaan dengan BUHIKA (Bina Usaha Home Industry Koperasi dan Kaki Lima). Semua hasil produksi tadi yang disana dari.. juga diberi peningkatan, kualitasnya juga ditingkatkan legalitas kita berikan, kita berikan itu kemudian kita masukkan di BUHIKA itu tadi, kita kerjasamakan dengan toko-toko yang sudah kita bina” (wawancara dengan Diskumnaker Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah daerah melalui Diskumnaker telah bekerjasama dengan beberapa dinas teknis untuk mempermudah para perintis usaha mikro. Kemudahan tersebut diantaranya adalah dalam hal perizinan usaha, pengolahan produk, dan pemasaran produk. Untuk memudahkan memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, pemerintah daerah Kabupaten Sampang membentuk BUHIKA (Bina Usaha *Home Industry*, Koperasi dan Kaki Lima). BUHIKA tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan membeikan legalitas kepada produk-produk usaha mikro milik masyarakat Sampang. Produk-produk dengan kualitas bagus dan memiliki label tersebut kemudian dipasarkan melalui toko-toko yang menjadi binaan pemerintah daerah Kabupaten Sampang.

Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang adalah terkait ketersediaan bahan baku usaha. Terkait ketersediaan bahan baku usaha Bapak Muhammad Irwan Ferdiawan selaku Penyuluh Perindag Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang berpendapat:

“Bahan baku, banyak bahan baku tapi kualitasnya yang mungkin masih kurang. Antara bahan baku yang bagus dan jelek itu kan yang penting bisa diolah tapi untuk produksi seperti tahu tempe itu juga harus mendatangkan bahan baku dari luar. Jadi banyak” (wawancara dengan Disperndag Kabupaten Sampang pada tanggal 22 Mei 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa bahan baku yang tersedia di Kabupaten Sampang cukup banyak akan tetapi kualitasnya masih kurang. Bahan baku yang tersedia dengan kualitas



yang rendah pun tidak jadi masalah asalkan masih bisa diolah, kecuali untuk beberapa bahan baku seperti kedelai dan lainnya, itu harus mendatangkan dari luar agar tetap bisa diolah.

## **2. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang**

Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Pendidikan mengadakan program pengentasan buta aksara berupa kejar Paket A, Paket B dan Paket C yang ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Sampang. Program ini diadakan dalam rangka mengentaskan angka putus sekolah masyarakat Kabupaten Sampang yang berusia 25 tahun keatas. Harapannya akan ada banyak masyarakat yang berminat untuk mengikuti kejar paket namun rencana tersebut belum bisa berjalan dengan mulus. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Moedjalli selaku Kabag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang:

“Ya melalui paket, gini.. biasanya ada perangsangnya kaya diberi alat masak. Tapi kalau untuk ... itu ya. Kalau untuk paket ya enggak, belum ini masih dalam tahap pencarian ini, gimana caranya biar orang mau masuk sekolah paket. Sekarang membujuknya hanya, paket ini kan BKBN yang melaksanakan bukan dinas pendidikan. Nah kita, BKBN ini yang membujuknya, kalau sampeyan dapet sekian akan dapet bonus sekian.” (wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang pada tanggal 18 Mei 2018).

Untuk menarik minat masyarakat Kabupaten Sampang agar mau mengikuti program pemerintah dibidang pendidikan yaitu kejar paket dibutuhkan suatu perangsang. Perangsang tersebut berupa pemberian alat masak bagi ibu-ibu dan pemberian bonus. Dalam melaksanakan program

ini Dinas Pendidikan bekerjasama dengan BKBN selaku lembaga pelaksana teknis program kejar paket. Strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurasi kesenjangan pendidikan antara masyarakat usia 25 tahun ke bawah dengan masyarakat yang usia 25 tahun keatas yang mana rata-rata belum tamat Sekolah Dasar.

Sementara untuk menunjang partisipasi masyarakat usia 25 tahun ke bawah dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang yaitu berupa pemberian beasiswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Moedjali selaku Kabag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang:

“Dan lagi menggenjot untuk yang perguruan tinggi. Yang perguruan tinggi itu usia-usia yang hampir 25. Kita adakan beasiswa” (wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang pada tanggal 18 Mei 2018)

Selain pemberian beasiswa tersebut, pemerintah Kabupaten Sampang juga telah menggratiskan biaya sekolah di Kabupaten Sampang. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan lebih mudah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Reza Bayu selaku Kassubid Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan Bappelitbangda Kabupaten Sampang:

“Ada, beasiswa beasiswa miskin ada bahkan untuk mahasiswa itu dari daerah memberikan. Karena kalau beasiswa itu kan sekarang nggak terlalu, nggak terlalu. Kan pendidikan gratis kan, nggak perlu biaya Cuma kita memberikan beasiswa untuk masyarakat miskin untuk membeli buku, membeli seragam.” (wawancara dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan pernyataan beliau, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sampang bukan hanya pemberian beasiswa bagi

anak sekolah yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun juga menggratiskan biaya masuk sekolah, khususnya untuk sekolah negeri. Pemberian bantuan bagi siswa miskin pun juga telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti seragam, buku dan lainnya.

Dibidang kesehatan, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang dalam menekan angka kematian dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia dilakukan melalui Dinas Kesehatan, yang dimana Dinas Kesehatan ini memiliki peran yang cukup strategis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lailatul Muadzomah selaku Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang:

“Sangat banyak perannya, karena usia harapan hidup/ angka harapan hidup itu menjadi indikator kinerja kita seperti.. angka harapan hidup it. Tapi kita tidak bisa mengukur angka harapan hidup kita itu, yang bisa ngukur itu ya pusat. Kita hanya menerima hasil akhir, jadi tahun ini ada angka harapan hidupnya sekian. Tapi bagaimana mengolah data itu kita tidak tau. Tapi itu menjadi indikator kinerja utama kita otomatis kita sangat berperan didalamnya. Apalagi kinerjanya Dinas Kesehatan itu mulai dari kehamilan sampai ibu itu akan melahirkan, itu ada di program kesehatan. 3 bulan setelah kehamilan, dari awal kehamilan yang masih berupa telur itu, ada programnya. Misalnya pemberian vitamin pada ibu hamil yang kurus, itu terus kita pantau di fasilitas kesehatan. Adaa indikatornya, kita harus.. berat badan bayi baru lahir harus 0, balita gizi buruk harus 0 dan mendapatkan peralatan.. itu nanti masuk usia sekolah ada indikatornya juga, anak usia sekolah yang mendapatkan pelayanan paripurna, disaat dia sudah masuk SMP ada.. karena usia.. 13-15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan.. usia lansia, ya udah pasti usia lansia kita layani sesuai dengan standart sampai ke jenis penyakitnya apa yang menjadi.. jadi setiap segmen kehidupan.” (wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa Angka Harapan Hidup sudah menjadi salah satu indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Melihat kondisi tersebut sudah jelas bahwa keberhasilan dan ketidakberhasilan program kesehatan tidak bisa dipisahkan dari peran Dinas Kesehatan. Adanya program-program kesehatan seperti pemberian vitamin pada ibu hamil yang kurus, berat badan bayi baru lahir harus 0, balita gizi buruk harus 0, pelayanan paripurna untuk anak usia sekolah, layanan untuk lansia dan lainnya menandakan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sampang dari lahir hingga lansia mendapatkan layanan kesehatan.

Selain memiliki peran yang cukup strategis dalam upayanya membangun manusia, Dinas Kesehatan juga memiliki strategi yang sudah pernah diterapkan untuk meningkatkan angka harapan hidup sebagai salah satu komponen pembangunan manusia dibidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lailatul Muadzomah selaku Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang:

“Untuk meningkatkan harapan hidup tadi? Kita setiap punya program kita harus disertai dengan rencana aksi. Kita ada evaluasi triwulanan itu untuk mengukur pembangunan manusia, dari evaluasi triwulanan itu kita akan tau mana capaian program yang rendah mana yang sudah tinggi dan itu harus disertai dengan rencana aksi. Rencana aksi itu kita.. di pedoman kita. Contohnya kaya kemaren itu dalam rangka mengirimkan.. dalam rangka meningkatkan usia harapan hidup kita punya 5 bebas 2 plus. 5 bebas itu bebas kematian ibu, bebas kematian bayi, bebas bayi dengan imunisasi tidak lengkap, bebas kusta, bebas gizi buruk dan 2 plus nya itu.. kita terbitkan kita lakukan. Trus kita juga punya inovasi berlian ibunda gerakan.. pokonya itu dalam rangka upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak. Jadi misalkan ibu bersalin itu kan dipantau dari bersalin langsung kita lakukan kita kirim ke bagian operator mulai dari data bapak ibuk, KK terus berat lahir, proses persalinannya normal atau caesar yang dialami,

rujuk atau tidak, nah itu salah satu inovasi. Dan masih banyak lagi” (wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Menurut kutipan wawancara diatas diketahui bahwa program-program kesehatan yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan disertai dengan rencana aksi. Dimana setiap triwulan terdapat evaluasi untuk mengukur ketercapaian program dan untuk program dengan capaian yang rendah maka akan disertai rencana aksi. Rencana aksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini berpatokan pada pedoman kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Rencana aksi yang dilakukan tersebut diantaranya yaitu 5 bebas 2 plus: bebas kematian ibu, bebas kematian bayi, bebas bayi dengan imunisasi tidak lengkap, bebas kusta, bebas gizi buruk, kita terbitkan dan kita lakukan. Rencana aksi lainnya yaitu adanya inovasi berlian ibunda gerakan, program ini dimaksudkan untuk memantau ibu bersalin mulai dari data keluarga, berat bayi lahir, proses persalinannya normal atau caesar dn sebagainya. Selain program untuk ibu hamil dan melahirkan tersebut, Dinas Kesehatan juga memiliki program lain sesuai dengan pernyataan Ibu Lailatul Muadzomah selaku Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang berikut:

“Adalagi saya lupa namanya itu untuk menuntaskan kematian ibu juga, kalau yang gizi buruk itu apa ya saya lupa inovasinya. Dan itu setiap tahun dilombakan ke tingkat nasional, kalau yang kemaren itu terkait dengan program nasional bebas pasung kita dapat meraih peringkat 6 dalam kategori pelayanan terbaik” (wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa program-program kesehatan yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Sampang ternyata juga telah mendapatkan penghargaan sebagai peringkat 6 dalam kategori pelayanan terbaik untuk program nasional bebas pasung. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pembangunan manusia khususnya dibidang kesehatan.

Berkaitan dengan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerahnya diantaranya yaitu: Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan sudah memiliki beberapa strategi. Salah satunya yaitu dengan membangun jejaring atau kerjasama antar daerah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Bahrul Alim selaku Kabid Ekonomi Bappelitbangda Kabupaten Sampang:

“Ya kalau strateginya adalah tadi membangun jejaring kita tidak bisa sendirian tetapi harus kerjasama. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua yang dilakukan adalah memfasilitasi terkait kebutuhan pengolahan rumah tangga.. dan yang ketiga kita mempermudah perizinan bagi masyarakat yang apa namanya ingin melaksanakan kegiatan.” (wawancara dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa Kabupaten Sampang tidak bisa memenuhi kebutuhan daerahnya tanpa adanya kerjasama. Sehingga membangun jejaring perlu dilakukan guna memperlancar kegiatan perekonomian yang ada di Kabupaten Sampang. Adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha dan fasilitasi kebutuhan usaha pengolahan rumah tangga adalah bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.



Selain membangun jejaring, pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja memberikan *upgrading* bagi masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ludfi selaku Kasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang:

“Kalau dari segi ketenagakerjaan kita ada pelatihan, 8 pelatihan. Dari segi koperasi saya kurang tau, mungkin semacam KUR itu” (wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa *upgrading* yang diupayakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) selaku pelaksana teknis adalah berupa pemberian pelatihan. Kurang lebih terdapat 8 pelatihan yang menjadi tanggungjawab Diskumnaker dalam rangka mengembangkan ketrampilan masyarakat Kabupaten Sampang yang usia produktif namun belum bekerja.

Sementara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang dalam upayanya meningkatkan pembangunan manusia khususnya dibidang ekonomi (kemampuan daya beli) memiliki strateginya sendiri. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Irwan Ferdiawan selaku Penyuluh Perindag Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang berikut:

“Kalau strategi kita punya grand design mbak untuk meningkatkan standarisasi SDM, kita selalu memberikan materi tentang HRP, motivation training dan membantu mereka untuk merencanakan kemudian membuat market inteligen. Jadi kita melatih SDM nya karena dari SDM insya allah akan menciptakan produk yang berkualitas” (wawancara dengan Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang pada tanggal 22 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa strategi yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Sampang berupa *grand design*, yang mana *grand design* ini bertujuan untuk meningkatkan standarisasi Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam melaksanakan *grand design* tersebut Disperindagtam selaku pelaksana teknis memberikan beberapa materi diantaranya yaitu materi tentang HRP, *motivation training* dan sebagainya. Pemberian materi tersebut tidak hanya dilakukan searah namun juga dua arah, artinya setelah menerima materi masyarakat yang menjadi peserta diminta untuk membuat perencanaan berupa *market inteligen*. Melalui cara tersebut kemudian masyarakat mampu menciptakan produk yang berkualitas.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat

#### a) Faktor Pendukung

Dalam menjalankan strategi peningkatan pembangunan manusia, setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang yang berhubungan secara teknis dengan komponen-komponen pembentuk IPM pasti memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang pertama berasal dari bidang pendidikan, seperti dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Moedjali selaku Kabag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang:

“Kalau pendukungnya kita disediakan anggaran oleh pemerintah, untuk paket A dan anggarannya cukup” (wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang pada tanggal 18 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan program pengentasan buta huruf bagi masyarakat usia 25 tahun keatas yang putus sekolah, pemerintah daerah Kabupaten Sampang menyediakan anggaran yang cukup besar. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Reza Bayu selaku Kassubid Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam sesi wawancara berikut:

“Kalau anggaran kita nggak, nggak kekurangan sebenarnya. Sangaatt banyak anggarannya diatas 20% dari anggaran yang ditetapkan oleh undang-undang itu kan untuk pendidikan minimal 20% dari APBD. Sangat-sangat besar sekali untuk anggaran yang positif.” (wawancara dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa anggaran dari pemerintah (APBD) yang dialokasikan untuk pendidikan adalah sebesar 20%. Dengan jumlah anggaran yang sebanyak itu memungkinkan bagi dinas-dinas teknis terkait untuk mengadakan program-program pengentasan buta huruf dan pemberian beasiswa berprestasi maupun beasiswa miskin bagi masyarakat Kabupaten Sampang. Sehingga semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses pendidikan gratis.

Sementara untuk faktor pendukung yang lainnya yaitu datang dari bidang kesehatan. Sedikit berbeda dengan apa yang dialami oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan berpendapat bahwa faktor sumber daya lah yang memiliki peran besar dalam mendukung melaksanakan strateginya. Hal ini seperti dikutip dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Lailatul

Muadzomah selaku Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang:

“kalau faktor pendukung kita punya sumber daya yang bagus lah walau sumber daya itu kurang, tetapi yang kita.. mampu menutupi kekurangan. Ya tapi tetep harus kerja keras, sudah kerja dengan melebihi beban kerja, kita punya itu kebijakan-kebijakan daerah.”  
(wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa Dinas Kesehatan memiliki sumber daya yang bagus dalam melaksanakan strateginya. Meskipun dalam sumber daya tersebut juga memiliki kekurangan, akan tetapi dengan kerja keras Dinas Kesehatan optimis dapat melaksanakan strateginya dengan baik. Apalagi dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Sampang terkait kesehatan sebagai faktor pendukung lain bagi Dinas Kesehatan.

Sementara dibidang ekonomi utamanya dalam meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini Bappelitbangda selaku koordinator program dan kegiatan bagi OPD-OPD teknis berpendapat bahwa daya dukung peningkatan pembangunan manusia khususnya dibidang ekonomi Kabupaten Sampang berasal dari sisi geografisnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahrul Alim selaku Kabid Ekonomi Bappelitbangda Kabupaten Sampang berikut:

“Kalau dari pendukungnya ya kita secara geografis, daerah yang memang cocok untuk pertanian, dan masyarakatnya masih banyak yang menggeluti dibidang pertanian. Jadi ada dari.. masih memiliki kebiasaan.. dan yang kedua infrastruktur sampai diwilayah pelosok pun sudah tersedia ya walaupun kualitasnya masih kurang.”

(wawancara dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa kondisi geografis Kabupaten Sampang memungkinkan bagi masyarakatnya untuk bercocok tanam dan memang sebagian besar masyarakat Kabupaten Sampang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Hal tersebut juga didukung oleh tersedianya infrastruktur sampai ke wilayah pelosok Kabupaten Sampang meskipun kualitasnya masih kurang. Sehingga adanya daya dukung ini haruslah dimaksimalkan agar kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Sampang dapat meningkat.

Untuk memaksimalkan daya dukung yang ada diatas, pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakatnya. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Ludfi selaku Kasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang:

“Kita di kantor dinas ini untuk pendukungnya ya untuk pelaksanaan pelatihan kita perekrutannya melalui semacam pendamping, pendamping kecamatan ada pendamping tenaga konsultan bisnis (TKB). Kita melakukan perekrutan disesi itu jadi benar-bener yang berminat yang memenuhi.” (wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam memberikan pelatihan bagi masyarakat utamanya masyarakat yang usia produktif namun belum bekerja, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja melakukan perekrutan pendamping dalam melaksanakan pelatihan. Perekrutan ini dilakukan melalui kecamatan yang kemudian tenaga pendamping tersebut disebut dengan

Tenaga Konsultan Bisnis (TKB). Proses perekrutan tersebut juga melalui seleksi yang cukup ketat sehingga tenaga pendamping yang terpilih adalah yang benar-benar berminat dan memenuhi kriteria. Tugas dari TKB itu sendiri adalah mendampingi masyarakat ketika pelatihan sedang berlangsung. TKB ini tersedia di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian materi pelatihan.

Selain pemberian pelatihan bagi masyarakat usia produktif yang belum bekerja, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja juga memberikan fasilitasi bagi *home industry*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari Ibu Madanise selaku Kabid Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang:

“Kemudian juga kita tingkatkan dengan kita bekerjasama dengan dinas teknis. Seperti misalnya kesehatan, misalnya kecamatan. Kalau kecamatan itu berkenaan dengan PISP nya itu izin (usaha) rumah tangganya, kalau kecamatan berkenaan dengan izin usaha mikro nya, karena mereka harus mempunyai legalitas yang kuat, itu ada dari sisi produksi. Dari sisi pasar apa? Kita punya satu program, program berkenaan dengan BUHIKA (Bina Usaha Home Industry Koperasi dan Kaki Lima). Semua hasil produksi tadi yang disana dari.. juga diberi peningkatan, kualitasnya juga ditingkatkan legalitas kita berikan, kita berikan itu kemudian kita masukkan di BUHIKA itu tadi, kita kerjasamakan dengan toko-toko yang sudah kita bina” (wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sampang memberikan kemudahan perizinan usaha bagi *home industry*. Kemudahan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Sampang ini berupa pengurusan perizinan usaha rumah tangga yang dapat



diproses melalui kecamatan. Pentingnya suatu usaha untuk memiliki legalitas dalam produksi menjadi salah satu alasan bagi pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan perizinan usaha. Sementara untuk kemudahan lainnya pemerintah juga mengeluarkan program berkenaan dengan BUHIKA (Bina Usaha *Home Industry*, Koperasi dan Kaki Lima). Untuk menjalankan program BUHIKA tersebut pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang bekerjasama dengan toko-toko yang sudah dibina. Sehingga masyarakat Kabupaten Sampang mudah untuk memasarkan produk-produk usahanya.

#### b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mungkin dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang yang berhubungan langsung secara teknis dengan komponen-komponen pembentuk IPM sangatlah kompleks. Faktor penghambat yang pertama berasal dari bidang pendidikan, seperti dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Moedjali selaku Kabag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang berikut:

“jadi animo masyarakat yang sudah tua-tua itu yang sulit untuk mengajaknya sekolah itu yang sulit” (wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang pada tanggal 18 Mei 2018)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa yang menjadi kendala utama bagi Dinas Pendidikan dalam menjalankan strateginya adalah Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang. Adanya animo yang berkembang di masyarakat utamanya yang berusia 25 tahun keatas yang beranggapan bahwa pendidikan tidak seberapa penting karena tidak mampu merubah kondisi perekonomian masyarakat. Apalagi dengan

kondisi usianya sudah tua dan tidak memungkinkan untuk mengenyam pendidikan karena sudah tidak mampu.

Disisi lain, ada faktor lain yang menyebabkan sulitnya pengentasan angka buta aksara di Kabupaten Sampang. Hal ini sesuai disampaikan oleh Bapak Reza Bayu selaku Kassubid Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan Bappelitbangda Kabupaten Sampang berikut:

“Penghambatnya sebenarnya.. untuk mencari orang-orang yang putus sekolah itu kan susah. Ada yang sudah ada diluar negeri, diluar kota.” (wawancara dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa banyaknya masyarakat Kabupaten Sampang yang merantau keluar daerah menyulitkan pemerintah daerah dalam mendata masyarakat yang putus sekolah untuk kemudian diikutkan program kejar paket. Sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia dibidang pendidikan sulit untuk terlaksana sesuai dengan rencana.

Dari bidang kesehatan, faktor penghambat justru datang dari eksternal SDM. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Lailatul Muadzomah selaku Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang berikut:

“Kalau faktor penghambatnya itu kita daerah miskin jadi kita kurang inovasi begini inivasi begitu. Kita punya kegiatan ini dalam rangka menurunkan ini ini, ternyata kita terhambat oleh anggaran. Sehingga kita harus mencari inovasi baru, strategi baru yang sesuai dengan anggaran dan itu cukup sulit menggerakkan bagaimana memaksimalkan. Karena kita masih dalam wilayah daerah miskin” (wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang adalah kurangnya inovasi. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah setempat untuk bidang kesehatan yang menjadi faktor utamanya sehingga Dinas Kesehatan merasa kesulitan dalam mencari inovasi baru yang sesuai dengan budget yang ada. Sebagai daerah miskin dengan anggaran yang terbatas dibidang kesehatan, cukup sulit bagi Dinas Kesehatan dalam memaksimalkan program yang ada.

Sementara dibidang ekonomi khususnya dalam aspek kemampuan daya beli, Bappelitbangda selaku koordinator program bagi OPD-OPD yang ada di Kabupaten Sampang menyampaikan adanya efek domino dari aspek lain sehingga memberikan dampak bagi aspek ekonomi. Hal ini seperti pernyataan Bapak Bahrul Alim Kabid Ekonomi Bappelitbangda Kabupaten Sampang berikut:

“Faktor penghambatnya ya mungkin di pendidikan, itu jadi faktor penyebab utamanya ya mbak di pendidikan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan di Sampang itu biasanya dijual dalam bentuk mentah, masih mentah, belum ada pengolahan-pengolahan lagi. Sehingga kalau kita lihat dari PDRB kita kontribusi dari sektor pengolahan masih.. kita masih banyak ya kalau umpamanya ada produk unggulan dari sini kitaa.. banyak dinikmati oleh..”  
(wawancara dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa faktor penghambat utama dari aspek ekonomi adalah berasal dari pendidikan. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat membuat produk-produk yang dihasilkan masih belum diolah sehingga ketika dijual pun masih dalam bentuk mentah. Jika dilihat dari kacamata ekonomi, hal ini justru

merugikan masyarakat, sebab produk-produk tersebut seharusnya bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika mereka mampu mengolahnya dan menjualnya dalam bentuk barang jadi ataupun setengah jadi. Sehingga kalau dilihat dari PDRB, kontribusi dari sektor pengolahan masih rendah.

Selain adanya efek domino, rendahnya perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang juga disebabkan oleh kondisi SDM nya itu sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Irwan Ferdiawan selaku Penyuluh Perindag Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang:

“disitu rata-rata mereka kan, kalau SDM nya masih muda itu kan mereka masih punya ijazah jadi ketika mengikuti pelatihan itu mereka semangat tapi setelah itu hilang semangatnya, karena apa? Karena mereka menganggap saya masih punya peluang untuk jadi karyawan. Sedangkan kalau kita mau melatih yang tua-tua itu tentu saja sangat susah kan untuk membentuk karakternya karena mereka sudah terbentuk secara alami. Makanya kita mengambil pemuda-pemuda karang taruna. Ketika ada pelatihan mereka semangat mungkin gaungnya itu satu bulan dua bulan itu masih ada tapi setelah itu, mereka berpikirnya saya kan masih bisa kerja yang lain. Jadi setelah itu hilang sendiri.. penghambatnya lagi ya ini rata-rata kan orang Madura gengsinya tinggi, jadi mereka akan melihat usaha yang sukses terlebih dahulu baru mereka mau buka usaha. Padahal pasar ini kan harus diikuti, trend nya, kalau kita mau mencari pasar kita akan kalah dengan usaha yang sudah ada sebelumnya. Trus ini lagi, yang membuat mereka jika mereka mendapatkan hasil yang kurang bagus maka itu akan menurunkan semangat mereka. Mereka pengennya langsung dapet hasil yang bagus. Kalau beli batik di Sampang dengan di Pamekasan misalnya, jelas harganya berbeda. Lebih mahal batik Sampang, karena kalo di Sampang itu harga pembatik, per batik itu harganya 50 ribu, membatik aja belum mewarnai. Kalau di Pamekasan pembatiknya dibayar 15 ribu per kain, itu beda.” (wawancara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan pada tanggal 22 Mei 2018)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa adanya animo yang berkembang di masyarakat khususnya para pemuda-pemudi Kabupaten Sampang yang beranggapan bahwa bekerja sebagai karyawan lebih bisa

dibanggakan dibandingkan dengan memulai usaha sendiri. Sehingga ketika mengikuti pelatihan, semangatnya hanya bertahan hingga 1 bulan atau 2 bulan. Sementara untuk melatih masyarakat yang usianya sudah tua, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan merasa kesulitan untuk membentuk karakternya, karena sudah tersebntuk secara alami.

Faktor penghambat lainnya yaitu tingginya gengsi masyarakat Madura, sehingga sulit untuk berkembang. Untuk memulai suatu usaha masyarakat lebih suka untuk menjadi pengikut. Mengamati terlebih dahulu usaha mana yang sudah berhasil dan mendapatkan banyak keuntungan, setelah itu akan ditiru. Hal tersebut dikarenakan orientasi masyarakat Kabupaten Sampang bukan pada proses melainkan hasil, sehingga ketika usaha yang didirikan gagal memberikan keuntungan yang melimpah, itu akan menurunkan semangat mereka. Padahal jika dilihat dari pangsa pasarnya, konsumen lebih tertarik pada sesuatu yang baru, yang berbeda dan bukan dari hasil tiruan. Selain itu, gaji pegawai di Kabupaten Sampang cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain di Madura. Hal ini dikarenakan tingginya gengsi dalam diri masyarakat sehingga standart yang diharapkanpun ikut tinggi.

### C. Analisis dan Interpretasi Data

#### 1. Penyebab Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang Berada pada Tingkatan Menengah Bawah

##### a) Aspek Pendidikan

Tinggi rendahnya pembangunan manusia suatu daerah diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana menurut Badan Pusat Statistik perhitungan IPM ini diperoleh dari hasil akumulasi aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan kemampuan daya beli. Dilihat dari aspek pendidikan, tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Sampang utamanya bagi masyarakat usia 25 tahun keatas menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai rata lama sekolah Kabupaten Sampang hingga tahun 2017 ini hanya 4 tahun atau setara dengan kelas 4 SD. Jika disandingkan dengan standart nasional pemerintah yang tercantum pada Nawacita Jokowi yaitu Wajib Belajar 12 Tahun yang diberlakukan sejak Juni 2015, ketercapaian pendidikan yang sudah ditempuh oleh masyarakat Sampang masih tergolong rendah dan jauh dari harapan. Sehingga hal tersebut berdampak pada kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sampang.

Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang adalah dalam melaksanakan program nasional sebagai upaya untuk mengurangi angka putus sekolah. Kendala tersebut munculnya justru dari internal masyarakat itu sendiri yaitu terkait dengan usia yang sudah tidak mumpuni serta budaya dan animo yang berkembang bahwa sekolah formal bukanlah sebuah prioritas dan tidak memiliki pengaruh



atas kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang saat ini. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat Kabupaten Sampang usia 25 tahun keatas yang putus sekolah mau mengikuti program pendidikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

Kendala yang muncul dari dalam internal masyarakat itu sendiri merupakan suatu masalah yang cukup kompleks untuk dihadapi. Sebab dari dalam diri masyarakatnya sudah tidak memiliki kemauan untuk maju (dari segi pendidikan) karena *mindset* dan orientasi masyarakat adalah pada kehidupan perekonomian mereka sendiri. Jika dengan mengikuti program kejar paket A, B maupun C perekonomian mereka bisa berubah maka masyarakat akan dengan senang hati berpartisipasi namun jika yang terjadi justru sebaliknya (tidak berpengaruh apapun pada kehidupan perekonomian mereka) maka masyarakat enggan untuk berpartisipasi. Pola pikir seperti inilah yang seharusnya dirubah, seperti yang disampaikan oleh Suryono (2010:23-25) tentang tujuan pembangunan sosial bahwa “Meningkatkan nilai individu-individu/ kemanusiaan; Meningkatkan kualitas hidup; Merubah struktur sosial”. Maksud dari kutipan tersebut adalah pendidikan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan nilai dari individu-individu itu sendiri dengan begitu kualitas hidup masyarakat pun meningkat dan secara otomatis akan berpengaruh pada struktur sosial masyarakat itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh oleh masyarakat apabila ingin menaikkan struktur sosial (dalam hal ini perekonomian ikut membaik) mereka.

b) Aspek Kesehatan

Pengukuran pembangunan manusia selanjutnya sesuai dengan komponen pembentuk IPM menurut Badan Pusat Statistik adalah dilihat dari aspek kesehatan. Adanya efek domino yang muncul akibat dari rendahnya pendidikan masyarakat Kabupaten Sampang adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan adanya program kesehatan. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada budaya yang berkembang dimasyarakat Sampang terkait kepercayaan pada pengobatan alternatif (non medis). Sehingga ketika ada keluarga yang mengalami permasalahan dengan kesehatan, masyarakat Kabupaten Sampang utamanya yang berada di wilayah pelosok secara otomatis memilih berobat ke alternatif (dukun) dibandingkan pengobatan medis.

Masalah kesehatan lainnya yang muncul di Kabupaten Sampang adalah terkait dengan ketersediaan air bersih. Kondisi geografis Kabupaten Sampang itu sendirilah yang mempengaruhi merata tidaknya akses air bersih, sebab beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang ada yang sering dilanda bencana banjir seperti Babakan, sebagian Karangpenang, Kedungdung (yang paling parah) dan daerah pinggiran lainnya. Adanya bencana banjir tersebut berdampak pada pencemaran sumber mata air bersih akibat adanya luapan air bah banjir.

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, Kabupaten Sampang sudah memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Setidaknya terdapat 21 Puskesmas, 260 Polindes, dan 89 Pustu yang merupakan jejaring dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Sampang. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat. Terkait dengan pelayanan, akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sampang baik yang miskin maupun yang kaya sangatlah mudah. Hal tersebut memang sudah selayaknya terjadi, karena kesehatan merupakan salah satu Pelayanan Dasar dalam Pembangunan Sosial yang berhak dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut seusai dengan sistem yang dituju dalam pembangunan sosial yaitu “Konsumsi dan distribusi; Pemenuhan kebutuhan dasar” (Suryono, 2010:23-25).

c) Kemampuan Daya Beli

Ukuran pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik yang terakhir adalah terkait dengan kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Sampang masih tergolong rendah, dikarenakan kurangnya inovasi dalam diri masyarakat sehingga berdampak pada produk yang dihasilkan yang masih dalam kondisi mentah atau belum diolah. Hal tersebut yang kemudian berdampak pada nilai jual dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Sampang. Nilai jual produk yang sudah diolah dengan produk yang masih mentah sudah pasti berbeda, sehingga ketika masyarakat tidak memiliki kreativitas dalam mengolah produk tersebut menjadi sesuatu yang baru maka nilai jualnya akan berbanding lurus dengan kualitas produknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Mahbub Ul Haq (1995:16) dibutuhkan “*empowerment*” yang dijabarkan oleh

Alhumami (2009:2) sebagai berikut: “pemberdayaan yang merujuk pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan, sehingga mereka memiliki kemandirian, otonomi dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan sosial)”. Adanya pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut diharapkan mampu membuat masyarakat setempat menjadi lebih mandiri dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Efek domino lainnya yaitu rendahnya harga jual produk-produk yang ada di Kabupaten Sampang telah mengakibatkan kontribusi PDRB dari sektor-sektor pertanian maupun perdagangan di Kabupaten Sampang ikut rendah. Sebesar 58,2% masyarakat Kabupaten Sampang bekerja disektor pertanian (meliputi perkebunan, perikanan, dan peternakan) sementara kontribusi terhadap PDRB yang dihasilkan dari penduduk yang bekerja disektor pertanian tersebut hanyalah sebesar 3,4%. Sementara masyarakat Kabupaten Sampang yang bekerja disektor perdagangan adalah sebesar 14,5% dan sisanya adalah yang bekerja di non pertanian dan non perdagangan (PNS, ibu rumah tangga, dan lain-lain).

Faktor lain yang mempengaruhi perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang adalah terkait dengan ketersediaan bahan baku usaha. Bahan baku yang ada di Kabupaten Sampang cukup banyak namun kualitasnya tidak cukup baik sehingga hasil produksi yang diperoleh tidak maksimal. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku,

pemerintah daerah Kabupaten Sampang melakukan kerjasama dengan mendatangkan beberapa bahan baku dari luar wilayahnya. Adanya kerjasama dalam hal mendatangkan bahan baku dari luar ini sudah sejalan dengan satu dari 4 komponen penting dalam paradigma pembangunan manusia menurut Mahbub Ul Haq (1995:16) yaitu “*productivity* (produktifitas yang merujuk pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi)”. Maksudnya adalah, pemerintah daerah Kabupaten Sampang telah menunjukkan usaha-usahanya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi diwilayahnya melalui kerjasama pengadaan bahan baku usaha.

## **2. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang**

Menurut David (2009:6) proses manajemen strategi terbagi menjadi 3 tahap yaitu perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Jika dikaitkan dengan strategi peningkatan pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Sampang, proses manajemen strategi yang terjadi disana dapat dikatakan sedang melalui ketiga tahap tersebut. Dikatakan demikian karena dari upaya/strategi peningkatan pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang berada pada tahap akan (perencanaan), sedang (implementasi), dan telah berlangsung (evaluasi).

Pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan program pengentasan buta aksara berupa kejar Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditujukan untuk masyarakat putus sekolah

dengan usia 25 tahun keatas. Luaran yang diharapkan dari rencana program tersebut adalah seluruh masyarakat putus sekolah yang berusia 25 tahun keatas dapat berpartisipasi namun ketika dimplementasikan cukup banyak masyarakat yang tidak mengikuti program tersebut. Evaluasi yang didapatkan dari kondisi tersebut adalah diperlukan sebuah rangsangan untuk menarik minat masyarakat setempat agar mau mengikuti program pengentasan buta aksara tersebut. Rangsangan tersebut adalah berupa pemberian alat masak bagi ibu-ibu dan pemberian bonus berupa uang saku bagi masyarakat yang mau berpartisipasi dalam program pemerintah.

Sementara untuk masyarakat usia sekolah, pemerintah daerah Kabupaten Sampang memilih strategi pemberian beasiswa, menggratiskan biaya sekolah negeri, dan pemberian bantuan bagi siswa miskin diwilayah bersangkutan. Luaran yang diharapkan dari rencana tersebut adalah masyarakat usia sekolah mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, upaya tersebut kemudian berhasil. Evaluasi yang didapatkan dari kondisi tersebut adalah program pemberian beasiswa, sekolah gratis, dan pemberian bantuan bagi siswa miskin yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang perlu dipertahankan. Hal ini dilakukan agar pembangunan manusia khususnya dibidang pendidikan di Kabupaten Sampang benar-benar meningkat.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kesehatan merumuskan beberapa program sebagai strategi untuk menekan jumlah kematian di Kabupaten Sampang. Sejalan dengan cita-cita pemerintah daerah setempat tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten



Sampang telah menetapkan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai salah satu indikator kinerjanya. Sehingga layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sampang sudah tersedia sejak dari ibu hamil, melahirkan, sampai lansia. Dalam menjalankan program kerjanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang selalu disertai dengan rencana aksi. Rencana aksi ini dilakukan setiap triwulan dengan disertai evaluasi untuk mengukur ketercapaian program yang telah dilaksanakan. Untuk program yang memiliki capaian yang rendah, maka akan disertai rencana aksi agar capaian program tersebut dapat meningkat. Rencana aksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tersebut berpatokan pada pedoman kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

Selama menjalankan tugasnya sebagai pelaksana teknis bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang telah mendapatkan penghargaan sebagai peringkat 6 dalam kategori pelayanan terbaik untuk program nasional bebas pasung. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari sisi internal kelembagaan Dinas Kesehatan sudah cukup baik dalam melaksanakan strategi peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sampang. Hanya saja masih diperlukan beberapa upaya untuk mengentaskan belenggu masyarakat utamanya masyarakat yang berpendidikan rendah dari ketidaktahuan akan adanya program kesehatan.

Kemampuan daya beli suatu masyarakat menjadi salah satu tolak ukur bagi pemerintah dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia, Kabupaten Sampang memiliki suatu permasalahan yang cukup kompleks

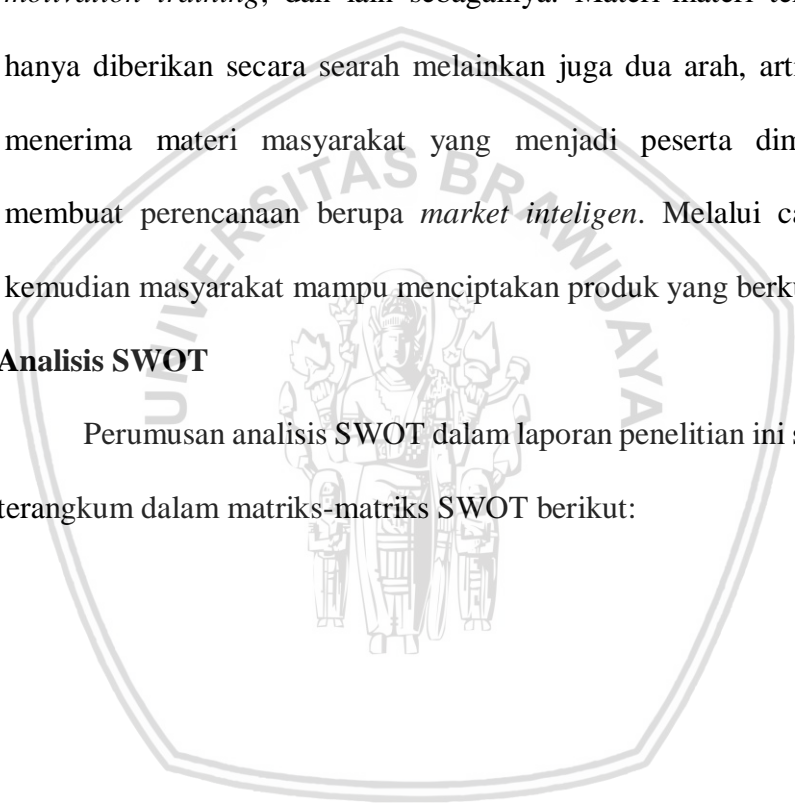
yang bermuara pada rendahnya pendidikan masyarakat disana yang akhirnya menimbulkan efek domino bagi sektor yang lain. Dalam upayanya untuk mengentaskan keterbelengguan akan kondisi yang terbelakang tersebut, pemerintah Kabupaten Sampang telah melakukan beberapa strategi guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang. Beberapa strategi tersebut diantaranya adalah pemberian kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha dan pemberian fasilitasi kebutuhan usaha rumah tangga. Dengan adanya kemudahan perizinan pendirian usaha dan fasilitasi kebutuhan usaha rumah tangga diharapkan minat masyarakat untuk berwirausaha semakin besar. Hal ini yang juga akan berpengaruh pada berkurangnya angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Sampang.

Strategi lainnya yaitu upaya membangun jejaring atau kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah ini dimaksudkan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sampang akan bahan baku usaha maupun akses pengiriman produk-produk usahanya. Kebutuhan akan pentingnya pengenalan brand produk usaha milik masyarakat Kabupaten Sampang akan lebih mudah apabila dilakukan melalui kerjasama dengan daerah sekitar melalui promosi dagang. Sehingga kerjasama antar daerah ini menjadi suatu yang penting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang untuk memasarkan produk-produk dari UKM binaan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja selaku pelaksana teknis.

Selain melalui kerjasama, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang telah membuat *grand design* yang mana *grand design* ini bertujuan untuk meningkatkan standarisasi Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam meningkatkan standarisasi Sumber Daya Manusia tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan selaku pelaksana teknis memberikan beberapa materi tentang HRP, *motivation training*, dan lain sebagainya. Materi-materi tersebut tidak hanya diberikan secara searah melainkan juga dua arah, artinya setelah menerima materi masyarakat yang menjadi peserta diminta untuk membuat perencanaan berupa *market inteligen*. Melalui cara tersebut kemudian masyarakat mampu menciptakan produk yang berkualitas.

### 3. Analisis SWOT

Perumusan analisis SWOT dalam laporan penelitian ini secara detail terangkum dalam matriks-matriks SWOT berikut:



**Tabel 4.8 Strategi *Strength-Opportunities* (S-O) dalam Analisis SWOT**

FAKTOR EKSTERNAL  FAKTOR INTERNAL		OPPORTUNITIES (PELUANG)		
		Besarnya minat anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi	Sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan manusia sudah tersedia	Adanya kerjasama antar daerah dan promosi dagang
		1.	2.	3.
STRENGTH (KEKUATAN)		Strategi S-O		
Sebesar 20% dana APBD dialokasikan untuk program-program pendidikan	1.	1. Alokasi dana APBD sebesar 20% untuk program-program pendidikan dapat lebih diprioritaskan bagi pemenuhan minat anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi 2. Inovasi dalam program kesehatan dapat dikembangkan lagi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia 3. Pemberian kemudahan izin usaha dan pemfasilitasan usaha bagi <i>home industry</i> perlu dimaksimalkan agar produk yang dihasilkan dapat dipamerkan dalam promosi dagang 4. Masyarakat usia produktif yang tidak bekerja dan sudah mengikuti pelatihan kemudian dikirim ke daerah lain untuk mengikuti program pemagangan sebagai bentuk kerjasama antar daerah		
Adanya inovasi program kesehatan	2.			
Pemberian kemudahan izin usaha dan pemfasilitasan usaha bagi <i>home industry</i>	3.			
Adanya pelatihan bagi masyarakat usia produktif yang tidak bekerja	4.			

Sumber: Data diolah, 2018

**Tabel 4.9 Strategi *Strength-Threats* (S-T) dalam Analisis SWOT**

FAKTOR EKSTERNAL  FAKTOR INTERNAL		THREATS (ANCAMAN)		
		Minimnya anggaran yang tersedia untuk program kesehatan	Banyaknya masyarakat Kabupaten Sampang yang merantau keluar kabupaten, keluar pulau dan keluar negeri	Akurasi data kondisi penduduk Kabupaten Sampang masih belum bisa dipertanggungjawabkan
		1.	2.	3.
<b>STRENGTH (KEKUATAN)</b>		<b>Strategi S-T</b>		
Sebesar 20% dana APBD dialokasikan untuk program-program pendidikan	1.	1. Pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kesehatan perlu membuat inovasi program kesehatan dengan menyesuaikan anggaran yang telah tersedia 2. Adanya pemberian pelatihan dan ketrampilan bagi masyarakat usia produktif yang tidak bekerja serta pemberian kemudahan izin usaha dan pemfasilitasan usaha bagi <i>home industry</i> menjadi salah satu upaya untuk menekan jumlah masyarakat Kabupaten Sampang yang merantau keluar daerahnya untuk urusan mencari lapangan pekerjaan		
Adanya inovasi program kesehatan	2.			
Pemberian kemudahan izin usaha dan pemfasilitasan usaha bagi <i>home industry</i>	3.			
Adanya pelatihan bagi masyarakat usia produktif yang tidak bekerja	4.			

Sumber: Data diolah, 2018

**Tabel 4.10 Strategi *Weakness-Opportunities* (W-O) dalam Analisis SWOT**

FAKTOR EKSTERNAL  FAKTOR INTERNAL		OPPORTUNITIES (PELUANG)		
		Besarnya minat anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi	Sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan manusia sudah tersedia	Adanya kerjasama antar daerah dan promosi dagang
		1.	2.	3.
<b>WEAKNESS (KELEMAHAN)</b>		<b>Strategi W-O</b>		
Animo yang berkembang di masyarakat bahwa pendidikan formal bukanlah suatu prioritas	1.	1. Kabupaten Sampang berpeluang untuk terbebas dari kategori daerah tertinggal karena besarnya minat anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan merubah animo yang selama ini berkembang dimasyarakat tentang pendidikan 2. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah akan program-program kesehatan dapat disiasati dengan pemberian sosialisasi program kesehatan melalui Desa Siaga serta memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan yang sudah tersedia 3. Gengsi masyarakat yang masih tinggi untuk memulai sebuah usaha serta minimnya inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengolah produk dapat diminimalisir melalui pelaksanaan <i>study banding</i> ke daerah lain yang lebih maju sehingga masyarakat termotivasi untuk menjadi pengusaha kreatif		
Pengetahuan masyarakat akan program-program kesehatan masih kurang	2.			
Gengsi masyarakat untuk memulai sebuah usaha masih tinggi	3.			
Minimnya inovasi dan kreativitas dari masyarakat sehingga produk yang dihasilkan masih mentah	4.			

Sumber: Data diolah, 2018



**Tabel 4.11 Strategi *Weakness-Threats* (W-T) dalam Analisis SWOT**

FAKTOR EKSTERNAL  FAKTOR INTERNAL		THREATS (ANCAMAN)		
		Minimnya anggaran yang tersedia untuk program kesehatan	Banyaknya masyarakat Kabupaten Sampang yang merantau keluar kabupaten, keluar pulau dan keluar negeri	Akurasi data kondisi penduduk Kabupaten Sampang masih belum bisa dipertanggungjawabkan
		1.	2.	3.
<b>WEAKNESS (KELEMAHAN)</b>		<b>Strategi W-T</b>		
Animo yang berkembang di masyarakat bahwa pendidikan formal bukanlah suatu prioritas	1.	1. Menambah pagu anggaran untuk program kesehatan untuk mengatasi minimnya anggaran yang tersedia untuk program kesehatan, kemudian mengadakan sosialisasi terkait program-program kesehatan kepada masyarakat melalui Desa Siaga 2. Perlu adanya keterlibatan teknologi dalam sebuah usaha baru untuk merubah <i>mindset</i> masyarakat agar mau berwirausaha serta mampu mengembangkan produk agar lebih kreatif dengan demikian akan mencegah masyarakat Kabupaten Sampang untuk merantau dengan alasan mencari kehidupan yang lebih baik		
Pengetahuan masyarakat akan program-program kesehatan masih kurang	2.			
Gengsi masyarakat untuk memulai sebuah usaha masih tinggi	3.			
Minimnya inovasi dan kreativitas dari masyarakat sehingga produk yang dihasilkan masih mentah	4.			

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sampang dapat memaksimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan mengetahui peluang dan ancaman yang ada dalam meningkatkan pembangunan manusia. Analisis yang sudah dilakukan telah melahirkan beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Sampang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya mengenai peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Sampang, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sampang berada pada posisi menengah bawah. Faktor-faktor tersebut didapatkan dari 3 komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Kemampuan Daya Beli.

Berkaitan dengan strategi peningkatan pembangunan manusia, pemerintah daerah Kabupaten Sampang pada dasarnya telah mengimplementasikan beberapa strategi terkait peningkatan komponen-komponen pembangunan manusia di Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini, strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang ditinjau berdasarkan proses manajemen strategi. Berdasarkan proses manajemen strategi menurut David (2009:6) strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pembangunan manusia adalah melalui dengan ketiga proses strategi yaitu perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi.

Hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya adalah didapatkan 11 strategi alternatif yang direkomendasikan untuk dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam upayanya

meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Sampang. Strategi tersebut dirumuskan dengan tujuan untuk memanfaatkan kekuatan dan memaksimalkan peluang yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat guna mengatasi kelemahan dan meminimalisir ancaman yang ada. Ke 11 strategi alternatif tersebut secara rinci penulis jabarkan dalam sub bab saran.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Alokasi dana APBD sebesar 20% untuk program-program pendidikan dapat lebih diprioritaskan bagi pemenuhan minat anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Pemberian kemudahan izin usaha dan pemfasilitasan usaha bagi *home industry* perlu dimaksimalkan agar produk yang dihasilkan dapat dipamerkan dalam promosi dagang.
3. Inovasi dalam program kesehatan dapat dikembangkan lagi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia.
4. Masyarakat usia produktif yang tidak bekerja dan sudah mengikuti pelatihan kemudian dikirim ke daerah lain untuk mengikuti program pemagangan sebagai bentuk kerjasama antar daerah.
5. Pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kesehatan perlu membuat inovasi program kesehatan dengan menyesuaikan anggaran yang telah tersedia.
6. Adanya pemberian pelatihan dan ketrampilan bagi masyarakat usia produktif yang tidak bekerja serta pemberian kemudahan izin usaha dan

pemfasilitasan usaha bagi *home industry* menjadi salah satu upaya untuk menekan jumlah masyarakat Kabupaten Sampang yang merantau keluar daerahnya untuk urusan mencari lapangan pekerjaan.

7. Kabupaten Sampang berpeluang untuk terbebas dari kategori daerah tertinggal karena besarnya minat anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan merubah animo yang selama ini berkembang dimasyarakat tentang pendidikan.
8. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah akan program-program kesehatan dapat disiasati dengan pemberian sosialisasi program kesehatan melalui Desa Siaga serta memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan yang sudah tersedia.
9. Gengsi masyarakat yang masih tinggi untuk memulai sebuah usaha serta minimnya inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengolah produk dapat diminimalisir melalui pelaksanaan *study banding* ke daerah lain yang lebih maju sehingga masyarakat termotivasi untuk menjadi pengusaha kreatif.
10. Menambah pagu anggaran untuk program kesehatan untuk mengatasi minimnya anggaran yang tersedia untuk program kesehatan, kemudian mengadakan sosialisasi terkait program-program kesehatan kepada masyarakat melalui Desa Siaga.
11. Perlu adanya keterlibatan teknologi dalam sebuah usaha baru untuk merubah *mindset* masyarakat agar mau berwirausaha serta mampu mengembangkan produk agar lebih kreatif dengan demikian akan

mencegah masyarakat Kabupaten Sampang untuk merantau dengan alasan mencari kehidupan yang lebih baik





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Allison, Michael dan Kaye, Jude. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. 2016. *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danar, Oscar Radyan. 2012. *Perencanaan Strategis*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- David, Freed R. 2009. *Strategic Management: Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- David, Fred R. dan Forest R. David. 2017. *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harjanto, Imam. *Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Haq, Mahbub Ul. 1995. *Reflection on Human Development: How the Focus of Development Economics Shifted from National Income Accounting to People-Centered Policies, Told by One of the Chief Architects of the New Paradigm*. Oxford: Oxford University Press.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pearce II, John A. dan Robinson, Richard B. 2014. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian (Strategic Management-Formulation, Implementation, and Control)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Pineda, Jose. 2012. *Sustainability and Human Development: A Proposal for Sustainability Adjusted HDI (SHDI)*. MPRA Paper No. 42636, posted 15 November 2012 15:23 UTC.
- Rangkuti, F. 1997. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cetakan Kesebelas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Tarigan, Robinson. 2015. *PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1989. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Umar, Husein. 2001. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Perusahaan Edisi 4*. Jakarta: PT. SUN.

#### DOKUMEN PERENCANAAN

Kabupaten Sampang dalam Angka Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2017

Data dari Dinas Kesehatan Tahun 2018

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang Tahun 2018

## JURNAL

- Engineer, Merwan et al. 2008. *The Human Development Index as a Criterion for Optimal Planning*. Department of Economics, University of Victoria, Victoria, Canada. Vol. 1, Issue 2, Pages. 172-192. Emerald Insight
- Favoreu, C. et al. 2016. *Strategic Management in the Public Sector: a Rational, Political or Collaborative Approach?*. Vol. 82, Issue 3, Pages 435-453. Scopus
- Fort, Alfredo L. 2017. *The Human Resource for Health Effort Index: A tool to Assess and Inform Strategic Health Workforce Investments*. Vol. 15, Issue 1, Article number 47. Scopus.
- Hatefi, S.M. 2018. *Strategic Planning of Urban Transportation System Based on Sustainable Development Dimensions Using an Integrated SWOT and Fuzzy COPRAS Approach*. Vol. 4, Issue 1, Pages. 99-112. Scopus
- Hoglund, L. et al. 2018. *Strategic Management in the Public Sector: How Tools Enable and Constrain Strategy Making*. Pages 1-28. Scopus
- Johnsen, A. 2016. *Strategic Planning and Management in Local Government in Norway: Status After Three Decades*. Vol. 39, Issue 4, Pages 333-365. Scopus
- Kayuni, H.M. 2017. *Strategic Planning in the Malawi Public Sector: Potential Tool for Progress or Regression?*. Vol. 17, Issue 3, Pages 372-391. Scopus
- Michael, Bryane. 2015. *What Does Brunei Teach Us About Using Human Development Index Rankings as a Policy Tool*. Department of Geography, University of Oxford, Oxford, United Kingdom. Vol. 36, Pages. 0414-0431. Scopus
- Noto, G. 2018. *Local Strategic Planning and Stakeholder Analysis: Suggesting a Dynamic Performance Management Approach*. Pages 1-18. Scopus
- Rahayu, S. et al. 2016. *Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure to Human Development Index (HDI) in Papua, Indonesia*. Vol. 22, Issue 12, Pages 4077-4081. Scopus

## REGULASI

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.

## WEBSITE

Badan Pusat Statistik. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2010 – 2016 (Metode Baru)*. Online melalui (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>) diakses pada 28 Oktober 2017.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota (Metode Baru) Tahun 2010 - 2016*. Online melalui (<https://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/102>) diakses pada 5 November 2017.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota, Tahun 2017*. Online melalui (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/15/733/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017.html>) diakses pada 18 Januari 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Angka Kesakitan Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/ Kota, 2014-2015*. Online melalui (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/16/202/angka-kesakitan-penduduk-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2014-2015.html>) diakses pada 18 Januari 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Konsep: Indeks Pembangunan Manusia*. Online melalui (<https://jatim.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>) diakses pada 18 Januari 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia*. Online melalui (<http://ipm.bps.go.id/page/ipm>) diakses pada 31 Januari 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2015*. Online melalui (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/07/26/347/tinggi-wilayah-di-atas-permukaan-laut-dpl-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2015.html>) diakses pada 28 Juni 2018.

Satu Data Indonesia. 2017. *#ForYourInfographic: Indeks Pembangunan Manusia*. Online melalui (<http://data.go.id/konten/foryourinfographic-indeks-pembangunan-manusia/>) diakses pada 15 Januari 2018.

- Sundari, Dyah Siti. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)*. Online melalui (<http://jateng.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=425&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897>) diakses pada 16 Januari 2018
- United National Development Programme. 2017. *INS-HDR2016 Indonesia Summary-final.pdf (Laporan Pembangunan Manusia/ Human Development Report 2016)*. Online melalui (<http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-HDR2016%20indonesia%20summary-final.pdf>) diakses pada 15 Januari 2018.





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 4477 /UN10.F03.11.11/7N /2018

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang  
Jalan Trunojoyo No.21  
Kabupaten Sampang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Ulfiona Rizki Ashari  
Alamat : Perum. Bumi Palapa No. E-30, Kota Malang  
NIM : 145030601111006  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Minat : Perencanaan Pembangunan  
Judul : Strategi Peningkatan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang  
Lamanya : 3 (tiga) bulan  
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 5 April 2018

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D

NIP. 19670217 199103 1 000





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Trunojoyo No. 21 Tel/Fax. (0323) 321 008

SAMPANG – 69211

www.bakesbangpol-sampang.net

email : bakesbangpol\_spg@yahoo.com

Nomor : 072/ ~~568~~ /434.401/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi ijin penelitian

Sampang, 27 April 2018

Kepada

Yth. 1. Kepala Bappelitbangda  
Kabupaten Sampang  
2. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sampang  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sampang  
4. Kepala Disperdagprn  
Kabupaten Sampang  
5. Kepala BPS Kab. Sampang  
6. Kepala DISKUMNAKER  
Kabupaten Sampang  
di-

SAMPANG

Menunjuk Surat : an. Dekan ( Ketua jurusan administrasi publik ) Fakultas  
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang  
Tanggal : 05 April 2018  
Nomor : 4477/UN10.F03.11.11/PN/2018  
Hal : Riset / survey  
Bersama ini di beritahukan bahwa :  
Nama Peneliti : ULFIONA RIZKI ASHARI  
Ala m a t : Jl. Pudak Kecamatan Babadan Ponorogo  
Judul : STRATEGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN  
MANUSIA KABUPATEN SAMPANG  
Tujuan Penelitian : Menyelesaikan tugas akhir / skripsi  
Lokasi : Bappelitbangda Kabupaten Sampang  
Tanggal/Lama Penelitian : 3 ( tiga ) Bulan  
Bidang Penelitian : Administrasi publik  
Status Penelitian : Mahasiswa  
Penanggung Jawab : -  
Anggota Penelitian : -

Sehubungan dengan hal tersebut, di harapkan dukungan dan kerja sama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang di perlukan.

Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat ;
2. Pelaksanaan ijin penelitian agar tidak di salah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat ;
3. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai, perpanjangan ijin harus di ajukan kembali kepada instansi pemohon
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Sampang dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN SAMPANG**

**H. RUDI SETIADI, SE, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19581129 198203 1 010

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sampang  
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  
Brawijaya Malang di Malang  
3. Yang bersangkutan

### Lampiran 3

#### Interview Guide

##### Bappelitbangda Kabupaten Sampang

1. Bagaimana peran Bappelitbangda dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sampang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sampang berada pada kategori rendah?
3. Strategi yang sudah pernah diupayakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
4. Dalam dokumen RPJM/Renstra/Renja termuat strategi terkait Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang, bisa dijelaskan terkait alasan pemilihan strategi tersebut?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Bappelitbangda dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
6. OPD-OPD mana saja yang menurut Bappelitbangda berhubungan langsung dengan capaian dan pembentukan IPM di Kabupaten Sampang?
7. Minta dokumen RPJM/Renja/Renstra Kabupaten Sampang

##### Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

1. Rata-rata penduduk di Kabupaten Sampang bersekolah hingga ke jenjang apa? Berapa tahun lamanya bersekolah?
2. Ketersediaan/jumlah SMK dan Politeknik yang ada di Kabupaten Sampang berapa?
3. Adakah pelatihan-pelatihan khusus bagi masyarakat usia produktif di Kabupaten Sampang?
4. Adakah tunjangan-tunjangan untuk tenaga pengajar di Kabupaten Sampang?
5. Faktor-faktor apa saja yang membuat anak-anak di Kabupaten Sampang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi?
6. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di bidang pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang?
7. Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
8. Upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?

9. Strategi apa yang sudah pernah diterapkan/ akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
10. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
11. Minta data yg berkaitan dg pendidikan (pembangunan manusia)

#### Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

1. Akses kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Sampang seperti apa? Apakah masyarakat miskin sulit mendapatkan akses kesehatan atau seperti apa?
2. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Sampang?
3. Adakah tunjangan-tunjangan untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Sampang?
4. Bagaimana ketersediaan akses air bersih bagi masyarakat (terutama masyarakat miskin) yang ada di Kabupaten Sampang?
5. Terkait Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Sampang yang rendah, faktor-faktor apa saja yang membuat AHH di Kabupaten Sampang rendah?
6. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
7. Upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
8. Strategi apa yang sudah pernah diterapkan/ akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
9. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
10. Minta data yg berkaitan dg kesehatan (pembangunan manusia)

#### Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang

1. Minta data terkait Indeks Pembangunan Manusia
2. Metode perhitungan IPM seperti apa?

3. Terkait nilai IPM Kabupaten Sampang yang rendah dan cenderung stagnan, bagaimana pendapat BPS?
4. Peran BPS dalam peningkatan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang seperti apa?

Dinas Koperasi & UMKM dan Dinas Perindustrian & Pertambangan Kabupaten Sampang

1. Pemberian perizinan usaha di Kabupaten Sampang seperti apa? Apakah sulit atau mudah?
2. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Sampang berkerja sebagai apa? Range penghasilan masyarakat Kabupaten Sampang
3. Apakah tidak ada bantuan permodalan untuk UMKM?
4. Adakah usaha rumahan (home industry) yang didirikan oleh masyarakat Kabupaten Sampang? Jika ada pengelolaannya seperti apa (dari produksi sampai pemasarannya)?
5. Adakah pelatihan-pelatihan tertentu (peningkatan kapasitas) para nelayan/petani yang ada di Kabupaten Sampang? Jika ada seperti apa penjelasannya
6. Kondisi ketersediaan bahan baku usaha, sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian di Kabupaten Sampang seperti apa?
7. Adakah kerjasama antar daerah (antara Kabupaten Sampang dengan kabupaten sekitarnya dalam hal perekonomian)?
8. Bagaimana peran Dinas Koperasi&UMKM / Disperindag Kabupaten Sampang dalam Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
9. Upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas Koperasi&UMKM / Disperindag dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
10. Strategi apa yang sudah pernah diterapkan/ akan dilakukan oleh Dinas Koperasi&UMKM / Disperindag Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
11. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Koperasi&UMKM / Disperindag Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang?
12. Minta data yg berkaitan dengan perekonomian (pembangunan manusia)



#### Lampiran 4



Wawancara dengan Bapak Moedjali selaku Kabag Program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang



Wawancara dengan Bapak Reza Bayu selaku Kassubid Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang



Wawancara dengan Bapak Bahrul Alim selaku Kabid Ekonomi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang



Wawancara dengan Ibu Madanise selaku Kabid Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro dari Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang





Wawancara dengan Bapak Ludfi selaku Kasi Pelatihan dan Tenaga Kerja dari Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang



Wawancara dengan Bapak Choirul Anwar selaku Sekretaris dari Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang



Wawancara dengan Ibu Lailatul Muadzomah selaku Administrator Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang



Wawancara dengan Bapak Arif Suroso selaku Kasie Neraca Wilayah & Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang



Wawancara dengan Bapak Muhammad Irwan Ferdiawan selaku Penyuluh Perindag dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang